



Seri Modul Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil
Pada Sektor Infrastruktur

MODUL 2:

ADVOKASI DAN RISET AKSI GESI PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR

Seri Modul
Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Pada Sektor Infrastruktur

MODUL 2: ADVOKASI DAN RISET AKSI GESI PADA SEKTOR INFRASTRUKTU

Seri Modul

Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Pada Sektor Infrastruktur

ADVOKASI DAN RISET AKSI GESI PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR

Tim Penyusun:

Tino Yosepyn

Sri Purwani

Nala Diradametha

Kontributor:

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi NTB

Ilustrasi:

Agah Nugraha Muharam

Tata Letak:

Yayasan Penabulu

Agah Nugraha Muharam

Kerja Sama:

KIAT

Yayasan Penabulu

Didukung oleh:

Pemerintah Australia

KATA PENGANTAR PENYUSUN

Amati, Renungkan, Lakukan, Evaluasi dan Modifikasi, merupakan 5 kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan sebuah istilah yang disebut Riset Aksi. Modul Advokasi dan Riset Aksi GESI pada Sektor Infrastruktur ini adalah modul yang disiapkan untuk mempertajam pemahaman tentang gender equality and social inclusion (GESI) dan merupakan sebuah modul panduan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran bagaimana sebuah riset aksi terkait dilaksanakan untuk melihat implementasi GESI dalam sektor infrastruktur. Riset ini bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dengan cara yang sederhana, partisipatoris dan efektif. Tahapan sederhana dengan metode pendekatan bahkan bisa dilakukan baik oleh kelompok di tingkat desa, kelompok khusus (perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas, dll) maupun NGO yang belum pernah melakukan kegiatan riset aksi.

Modul panduan riset aksi ini memuat apa dan bagaimana riset aksi, tujuan dan manfaat sebuah riset aksi, siapa yang bisa melakukan riset aksi, bagaimana tahapan melakukan riset aksi, mengapa perlu dilakukan sebuah riset aksi, bentuk-bentuk riset aksi dan sektor-sektor apa saja yang bisa disasar dalam sebuah riset aksi, dll. Modul ini juga disertai contoh-contoh dan praktek baik yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga di Nusa Tenggara Barat yang menjadi mitra program KIAT diantaranya: Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB serta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi NTB dalam kegiatan riset aksi aksesibilitas jalan dan fasilitas transportasi khususnya pedestrian di wilayah Kota Mataram NTB. Dua kegiatan riset aksi oleh 2 lembaga di NTB ini dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif karena mempunyai tujuan berbeda yakni: HWDI bertujuan untuk melakukan advokasi terkait aksesibilitas jalan bagi penyandang disabilitas di Kota Mataram sedangkan FLLAJ NTB bertujuan untuk pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) yang akan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Kota Mataram.

Semoga contoh-contoh sederhana dan penjelasan yang singkat tentang Riset Aksi GESI ini mampu menjadi "jalan" bagi sebuah proses internalisasi pemahaman GESI bagi semua stakeholders yang terkait dengan infrastruktur, lembaga-lembaga pemerhati infrastruktur maupun GESI serta semua pihak yang peduli pada pemenuhan hak masyarakat di bidang fasilitas dan pelayanan umum. Infrastruktur untuk semua menjadi sumber harapan bagi mereka yang selama ini kurang tersapa. Selamat membaca dan mencoba.

Jakarta, Juni 2019

Tim Penyusun

DAFTAR SINGKATAN

APILL	: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
CSO	: Civil Society Organization
CEDAW	: The Convention the Elimination of all Form of Discrimination againt Women
FLLAJ	: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
GESI	: Gender Equality and Social Inclusion
HWDI	: Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas
Inpres	: Instruksi Presiden
IWAPI	: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
KPPPA	: Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non Goverment Organization
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPDI	: Paguyuban Penyandang Disabilitas Indonesia
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPP	: Rencana Peraturan Pemerintah
SDGs	: Sustainable Develeopment Goals
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISTILAH

ANCEFA	: The Africa Network Campaign on Education for All
APILL	: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
CBD	: Center Business District
CSO	: Civil Society Organization
DED	: Detail Engineering Design
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: Focus Group Discussion
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
MPBM	: Mekanisme Perencanaan Berbasis Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PPF	: Proyek Perencanaan Fisik
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RAP	: Riset Aksi Partisipatoris
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDGs	: Sustainable Develeopment Goals
SOC	: Social Overhead Capital
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UNICEF	: United Nations Childrens Fund
UU	: Undang-Undang
UUPD	: Undang-Undang Penyandang Disabilitas

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Yayasan Penabulu	i
Daftar Singkatan	ii
Daftar Istilah	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	vi

BAB I.

ADVOKASI KEBIJAKAN dalam PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR yang RESPONSIF GESI

A. ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK	1
A.1. Menenal Advokasi Kebijakan Publik	1
A.2. Tujuan dan Manfaat Advokasi Kebijakan Publik	3
A.3. Konsep Pembangunan di Indonesia	4
B. ADVOKASI GESI PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR	6
B.1 Konsep Gender Equality and Social Inclusion (GESI)	6
B.2 GESI pada sektor Infrastruktur d.....	8
B.3 Tahapan dan Strategi Advokasi dalam bidang Infrastruktur	10
B.4 Pengarusutamaan GESI di Indonesia	11

BAB II.

MERANCANG RISET AKSI dalam PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR yang RESPONSIF GENDER dan SOSIAL INKLUSI (GESI)

A MENGENAL RISET dan MANFAATNYA	13
A.1 Riset Aksi Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat	15
A.2 Mengapa Riset Aksi Dilakukan	16
A.3 Tujuan, Manfaat, dan Prinsip Riset Aksi	16
A.4 Sektor-sektor Tujuan Perubahan Kegiatan Riset Aksi	18
A.5 Infrastruktur yang Responsif GESI	19
B. RISET AKSI PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR.....	23
B.1 Tahap-Tahap Riset Aksi pada Sektor Infrastruktur	23
B.2 Pelibatan Stakeholders Kunci ke dalam Riset Aksi	26
B.3 Evaluasi Kapasitas	27
B.4 Melaksanakan Riset Aksi	29
B.4.1 Menyusun Proposal/KAK Riset Aksi	29
B.4.1.1 Latar Belakang Riset	29
B.4.1.2 Tujuan Riset	31
B.4.1.3 Manfaat Riset	32
B.4.1.4 Kajian Pustaka	33
B.4.1.5 Bentuk Riset	33
B.4.1.6 Tahapan Riset	34

B.4.1.7 Sampel Riset	37
a. Sampel Jumlah Besar	37
b. Sampel Jumlah Kecil	38
B.4.1.8 Indikator Riset	39
B.4.1.9 Teknik Pengumpulan Data	40
B.4.1.10 Teknik Analisis Data	41
B.4.1.11 Rentang Waktu Riset	42
B.4.1.12 Rencana Anggaran dan Biaya	42
B.4.2 Pengumpulan Data	44
B.4.3 Analisis dan Laporan	45
B.4.3.1 Analisis Data	45
a. Analisis Data Deskriptif-Kuantitatif	45
b. Analisis Deskriptif-Kualitatif	46
B.4.3.2 Sistematika Laporan Riset Aksi	46
B.4.3.2.1 Kesimpulan	47
B.4.3.2.2 Saran dan Rekomendasi	48
B.5 Cara Menggunakan dan Tidak Lanjut Riset Aksi	50
B.5.1 Policy Brief	50
B.5.2 Concept Note	52
B.5.3 Proyek Perencanaan Fisik	53
B.5.4 Lobi & Audiensi	54
B.5.5 Konsultasi Publik	54
B.5.6 Kampanye Media	55

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur yang berpihak bagi perempuan dan penyandang disabilitas, kiranya menjadi salah satu impian sebuah tata kota yang saat ini sudah menjadi keharusan karena hadirnya Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mengadopsi pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan mandat Inpres No 9/2000 tersebut. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Namun, masih banyak tantangan dalam proses penyediaan fasilitas infrastruktur yang dapat diakses oleh semua orang karena kondisi lokasi pembangunan infrastruktur sangat beragam, terutama di wilayah perkotaan yang mempunyai tingkat kemacetan maupun pertumbuhan penduduk yang cukup cepat dan padat. Sehingga seringkali menghambat proses penataan ruang terbuka dan fasilitas layanan publik bagi pengguna jalan terutama penyandang disabilitas.

Infrastruktur jalan di berbagai kota/kabupaten dan provinsi secara regulasi harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang mempermudah akses bagi semua pengguna jalan seperti pedestrian, ram, *guiding block*, pegangan pengaman, halte, kursi, lampu penerang maupun penyeberang jalan yang dilengkapi dengan rambu khusus. Namun, fasilitas yang mempermudah aksesibilitas tersebut memang masih sangat minim tersedia. Inilah yang menjadi tantangan utama pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu perlu kerjasama aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk terlibat, memberi input dan perbaikan dengan mengedepankan data dan fakta.

Salah satu upaya untuk memperoleh data dan fakta tentang infrastruktur yang berpihak tersebut dapat dilakukan melalui satu kegiatan yang disebut Riset Aksi. Riset aksi dapat dilakukan oleh instansi swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat/NGO atau forum-forum yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi maupun kebijakan baik kondisi dan kebijakan terkait dengan infrastruktur, fasilitas penunjang, gedung layanan publik seperti: rumah sakit, sekolah, gedung pemerintahan, tempat ibadah, pasar, pusat bisnis, dll. Harapannya, riset aksi bisa melahirkan kebijakan dan kondisi baru yang berpihak pada rakyat kecil, lemah, terutama penyandang disabilitas, kelompok rentan dan anak.

Mengapa Modul Ini Diperlukan

Modul Advokasi dan Riset Aksi GESI dalam Sektor Infrastruktur ini dirancang melalui pendekatan, waktu dan metode yang disesuaikan dengan pengguna sehingga bersifat lebih praktis dan implementatif bagi para pengguna terutama institusi pemerintah, NGO, maupun stakeholders terkait yang bersentuhan langsung dengan sektor infrastruktur.

Secara umum modul bahan bacaan Advokasi dan Riset Aksi GESI dalam Sektor Infrastruktur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan sebuah riset aksi bagi para CSO dan Forum pemerhati infrastruktur seperti Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta stakeholders strategis di dalamnya: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain yang bergerak di isu perempuan, disabilitas dan anak. Secara khusus tujuan modul ini antara lain:

Memberikan pemahaman tentang Apa yang disebut dengan riset aksi

Menyamakan pemahaman tentang Riset Aksi sebagai salah satu bagian dari Advokasi

Mengenalkan mekanisme dalam kegiatan Riset Aksi dalam Infrastruktur

Memberikan contoh-contoh kegiatan Riset aksi dari para mitra KIAT di NTB

Siapa Pengguna Modul

Secara khusus modul yang memuat bahan bacaan ini dapat digunakan oleh 4 stakeholders kunci yakni institusi pemerintah daerah, LSM, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), Perguruan Tinggi maupun sektor Bisnis yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan pemenuhan hak atas infrastruktur terutama bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

Bahan bacaan maupun metode riset aksi dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah pengguna. Artinya materi yang sesuai dengan regulasi nasional bisa menjadi rujukan, namun metode maupun tahapan tidak harus direplikasi secara sama persis, tetapi disesuaikan dengan situasi kondisi berbagai daerah di Indonesia.

BAB I

Advokasi Kebijakan dalam Pembangunan Infrastruktur yang Responsif GESI

A Advokasi Kebijakan Publik

A.1 Mengetahui Advokasi Kebijakan Publik

Kita sering mendengar pernyataan seperti: “Kita harus meng-advokasi pemerintah supaya bisa mengubah kebijakannya”; atau “kondisi infrastruktur yang tidak ramah terhadap perempuan dan penyandang disabilitas tersebut perlu diadvokasi” dalam aktivitas sosial yang ditujukan untuk melakukan perubahan.

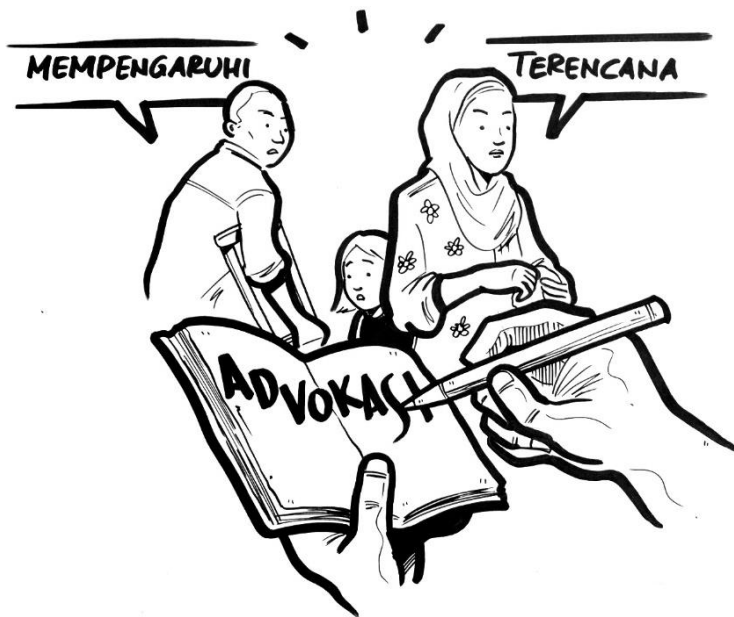
Lalu apa sebenarnya makna advokasi itu sendiri? Advokasi mengandung makna sebagai upaya perubahan, sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan, dengan berbagai cara, terutama menggunakan komunikasi. Ada penyampai pesan (yang menginginkan perubahan), pesan itu sendiri (apa perubahan yang diinginkan), dan penerima pesan (mereka yang diminta untuk melakukan perubahan).

Menurut *CARE International*, advokasi didefinisikan sebagai - “*Advocacy is the deliberate process of influencing those who make decisions about developing, changing and implementing policies.*” - **Advokasi** adalah **proses sengaja** untuk **mempengaruhi mereka yang membuat keputusan tentang pengembangan, perubahan, dan pelaksanaan kebijakan.**

Definisi di atas menganggap proses komunikasi dalam advokasi sebagai upaya mempengaruhi secara terencana dan terarah. Artinya, proses itu tidak dilakukan sembarangan dan hanya mengikuti dorongan semangat semata, tetapi harus disertai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Dengan

kata lain, advokasi diadakan untuk berhasil, dan tidak sekadar untung-untungan belaka.

Advokasi adalah usaha sengaja (action with purposes), ada niat dan kehendak di situ. Sebagai upaya sengaja, maka kejelasan tentang strategi dan target advokasi menjadi penting. Disinilah perbedaan advokasi dengan penyampaian aspirasi atau sekadar penyebaran informasi atau kampanye untuk perubahan sosial yang biasanya lebih bersifat insidental. Advokasi meminta adanya langkah-langkah dan indikator pencapaian yang jelas, terencana dan terukur. Selain itu, kata kunci dalam advokasi adalah perubahan/penguatan kebijakan. Advokasi berusaha mengubah kebijakan. Advokasi bukan sekadar untuk merubah perilaku atau keadaan, tetapi terutama untuk merubah kebijakan. Diharapkan dengan perubahan kebijakan, maka perilaku dan keadaan akan berubah. Tentu saja fokus pada kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa kebijakan negara (baik di tingkat pusat, maupun daerah) berpengaruh kuat terhadap kondisi kehidupan dan bahwa banyak persoalan tidak bisa dilepaskan dari adanya kebijakan yang bermasalah, kurang tepat, atau kurang sempurna.



Dari definisi tersebut, dapat dilihat 3 aspek utama dari advokasi, yaitu:

1. Mempengaruhi/meyakinkan
2. Terarah/terencana
3. Pengambil keputusan

Dalam kata lain, advokasi bukanlah tindakan langsung dalam proses pembangunan ataupun perubahan, melainkan seluruh bentuk komunikasi untuk meyakinkan pihak-pihak berwenang secara teratur dan terencana.

Dengan menggunakan definisi advokasi tersebut, dapat disimpulkan advokasi publik adalah bentuk advokasi pada pembangunan, perubahan, atau kebijakan pada level publik. Berikut adalah karakteristik dari konsep advokasi publik yaitu:

1. Berbentuk peningkatan kesadaran atau pemahaman
2. Dibentuk berlandaskan rencana atau ideologi tertentu
3. Ditujukan pada pengambil keputusan
4. Bertujuan mempengaruhi pembangunan atau kebijakan publik

A.2 Tujuan dan Manfaat Advokasi Kebijakan Publik

Tujuan advokasi publik sudah tergambar dalam definisi dan karakteristik yang dijabarkan di atas, yaitu mempengaruhi pihak pengambil keputusan terkait dengan proses pembangunan, perubahan, atau implementasi kebijakan pada level publik/masyarakat umum. Menurut *The Africa Network Campaign on Education for All* (ANCEFA) sebuah NGO di Africa yang berdiri tahun 2002 dengan fokus mempromosikan, mengaktifkan dan memperkuat kapasitas masyarakat sipil Afrika untuk advokasi dan kampanye untuk pendidikan gratis untuk semua, bentuk pengaruh dari advokasi publik terhadap kebijakan¹ yaitu:

- Menciptakan kebijakan baru
- Meningkatkan efektifitas and efisiensi kebijakan yang sudah ada
- Mengembangkan proses evaluasi dan penegakkan dalam dalam kebijakan

Pendapat tersebut tidak menyebutkan dengan spesifik arah perubahan yang dihasilkan oleh proses advokasi public. Arah perubahan proses advokasi publik akan sangat dipengaruhi oleh landasan ideologi pihak yang mengembangkan upaya advokasi publik tersebut. Oleh karena itu, manfaat utama dari pelaksanaan advokasi publik bukanlah bentuk perubahan atau pembangunan dalam masyarakat, namun lebih kepada keuntungan yang didapatkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan advokasi tersebut²yaitu:

1. Pemberdayaan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan perubahan
2. Sebagai bentuk kontrol terhadap akuntabilitas, responsibilitas, dan respons pemerintah
3. Meningkatkan interaksi dan keseimbangan peran antara masyarakat dan pemerintah

Ketiga poin manfaat yang dihasilkan dari sebuah advokasi publik maka kita perlu merefleksikan dengan sebuah pertanyaan, “ Apakah saat ini arah pembangunan Indonesia sudah selaras dengan tujuan negara?” Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita sandingkan dengan pesatnya pembangunan di berbagai sektor melalui strategi pembangunan nasional yang dimotori oleh Kementerian PUPR dalam berbagai bidang infrastruktur.

¹Obondoh (2004), hal.1

²Allan (2014), hal.5

A.3 Konsep Pembangunan di Indonesia

Kita telah lama mendengar istilah “Pembangunan,” berdasarkan UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa **visi pembangunan nasional** adalah untuk mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri; Berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju; Berarti tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil; Berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur; Berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Dari keseluruhan arti tentang pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi pembangunan *mencakup seluruh upaya transformasi terencana dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat* secara mandiri, lintas batas, tanpa diskriminasi dan untuk semua. Dari pemahaman ini terlihat hubungan yang sangat erat antara advokasi publik sebagai upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik, dengan pembangunan sebagai upaya-upaya pemenuhan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sejalan dengan definisi pembangunan di atas, maka konsep pembangunan Indonesia memiliki paradigma pembangunan nasional yang mempunyai tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan landasan Pancasila sebagai pedoman utamanya³. Berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017, sektor-sektor yang menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional Indonesia adalah infrastruktur, pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial⁴.

Penjelasan tersebut memberikan penekanan bahwa **sektor infrastruktur** adalah salah satu **prioritas pembangunan Indonesia** selain sektor lain seperti pembangunan sosial dan pembangunan sumberdaya manusia.

³Kartasmita (1996), hal.20-21

⁴Ini Lima Sektor Prioritas Pembangunan dalam RAPBN 2017, diakses <https://bisnis.tempo.co/>

Percepatan pembangunan sektor Infrastruktur di Indonesia yang sangat pesat ini perlu diimbangi dengan sebuah advokasi atas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain kegiatan advokasi diperlukan sebagai penyeimbang arah pembangunan yang adil dan berpihak bagi seluruh masyarakat Indonesia.



B Advokasi GESI pada Sektor Infrastruktur

B.1 Konsep Gender Equality and Social Inclusion (GESI)

Konsep Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI), bukanlah konsep yang asing di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Konvensi tersebut menandai awal langkah nyata dari tindakan persamaan hak dan pemberantasan diskriminasi di dalam masyarakat.

Proses persamaan hak bagi perempuan di Indonesia, terus berlanjut hingga tahun 2000, dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya yang berfokus pada pemberantasan diskriminasi, instruksi presiden ini secara aktif mengikutsertakan kaum perempuan di dalam proses pembangunan. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perspektif gender, dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya⁵. Kedudukan pengarusutamaan gender di dalam peraturan dan undang-undang semakin diperkuat dengan disusnya draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2006⁶.

Pada titik ini, dapat dilihat pentingnya aspek GESI dan pengarusutamaan gender di dalam pembangunan Indonesia. Untuk mendefinisikan target utama dari implementasi GESI dan pengarusutamaan gender, pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 Tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target), dengan tujuan utama **“Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan”**. Dengan target utama dari kesetaraan gender serta pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan dalam TPB adalah;

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan
- Menghapuskan semua praktik-praktik yang membahayakan

⁵Pentingnya Kesetaraan Gender dan Keadilan di Indonesia, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/>

⁶ibid

- Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
- Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.

Visi dari ke 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) yang tengah berjalan di Indonesia.



B.2 GESI pada Sektor Infrastruktur

Secara singkat, pembangunan adalah seluruh upaya transformasi terencana dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang secara khusus berfokus pada bidang infrastruktur.

Menurut *World Bank*, infrastruktur adalah seluruh pelayanan, termasuk energi, transportasi, telekomunikasi, distribusi air, sanitasi, dan pengolahan sampah, yang secara khusus mempengaruhi aktivitas dan produktivitas rumah tangga⁷. Baik dari definisi *World Bank* ataupun pembangunan nasional Indonesia, terdapat satu titik temu dari konsep pembangunan infrastruktur, yaitu memahami infrastruktur sebagai - **permodalan yang terwujud dalam bentuk fasilitas dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat** - untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, akomodasi, dan lainnya. Konsep ini dikenal sebagai *Social Overhead Capital (SOC)*⁸. Maka perlu dicermati pada pembahasan **GESI dalam infrastruktur**, adalah **memahami** bagaimana **terbentuknya ketidaksetaraan** di dalam **rancangan, implementasi, dan penggunaan fasilitas dan jasa** di kehidupan sehari-hari, **bagi kaum perempuan, disabilitas, dan anak**.

Walaupun terlihat rumit, memahami penerapan GESI dalam infrastruktur dapat dilakukan cukup dengan mengamati kondisi lingkungan di kehidupan sehari-hari. *World Bank* menggunakan 2 acuan sederhana dalam mengevaluasi inklusi aspek gesi dalam pembangunan infrastruktur⁹; Pertama adalah memperhatikan apakah fungsi dan kegunaan infrastruktur yang ada memberikan keuntungan yang sama serta tidak membawa kerugian, baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan; Yang kedua adalah memperhatikan apakah terdapat ketidakseimbangan dalam konteks masyarakat mengenai akses terhadap fungsi-fungsi infrastruktur tersebut. Berangkat dari kedua acuan tersebut, kita akan dapat mengembangkan kerangka evaluasi inklusi GESI dalam pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai dan spesifik dengan lingkungan sekitar kita.

⁷ World Bank (1994), hal.13

⁸Social Overhead Capital, diakses dari <https://www.theprojectdefinition.com/>

⁹World Bank (2009), hal.16



B.3 Tahapan dan Strategi Advokasi dalam Infrastruktur

Hingga tahap ini, telah dibahas beberapa ruang lingkup dari konsep-konsep seperti advokasi publik, pembangunan infrastruktur, dan GESI. Konsep-konsep tersebut mendefinisikan hubungan antara aktivitas advokasi dengan pembangunan, serta aplikasiaspek GESI dalam infrastruktur, terutama pada tataran teori dan konsep. Sedangkan pada tataran praktik, cenderung lebih leluasa dalam memahami dengan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut.

Setiap pihak memiliki tahapan implementasi advokasi dalam bidang infrastruktur, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pihak tersebut. Biasanya tahap dan strategi advokasi dikembangkan berdasarkan panduan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksana advokasi. Salah satu pedoman tahap dan strategi advokasi yang sering menjadi rujukan adalah milik Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak dalam bidang Hak Anak atau yang lebih dikenal dengan UNICEF (*United Nations Childrens Fund*). Dalam pedoman tersebut, tahapan proses advokasi disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan seperti dalam tabel berikut.¹⁰

Tahap	Pertanyaan Kunci
Perencanaan Topik Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa topik advokasi yang diinginkan? ▪ Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam topik tersebut?
Pengembangan Pesan Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana mengembangkan pesan advokasi yang akan didengarkan
Strategi Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapa yang akan membawakan pesan advokasi agar pesan didengarkan oleh pihak-pihak terkait? ▪ Strategi advokasi apa yang sesuai agar pesan advokasi didengarkan oleh pihak-pihak terkait? ▪ Sumber daya apa yang diperlukan untuk melakukan implementasi advokasi? ▪ Sumber daya apa saja yang saat ini dimiliki oleh pelaksana implementasi advokasi? ▪ Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan dalam proses implementasi advokasi?
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana cara mengukur efektivitas dan efisiensi dari proses advokasi yang telah dilakukan?

TABEL 1. Kerangka Tahapan Advokasi UNICEF

¹⁰Cohen (2010), hal.17

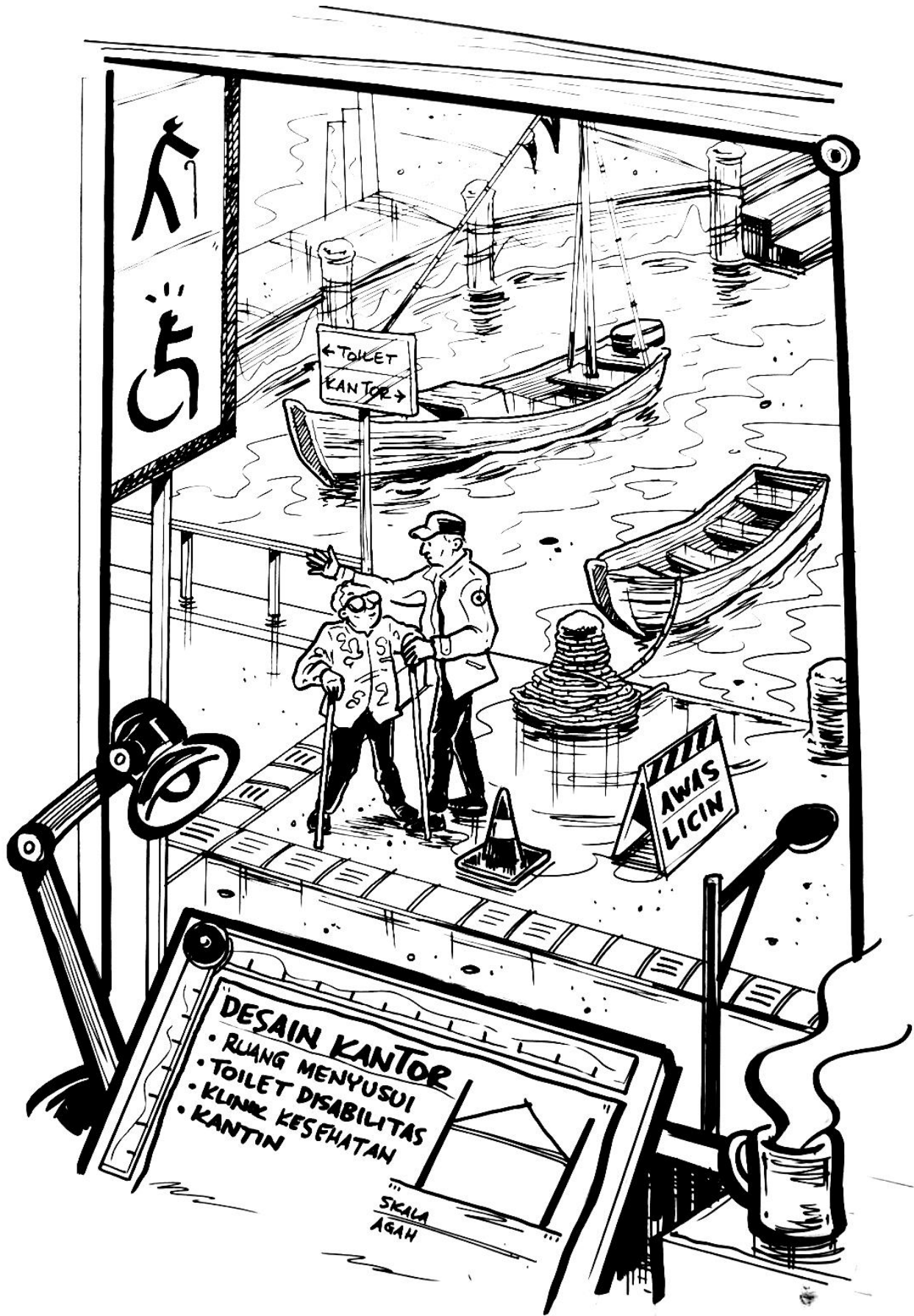
B.4 Pengarusutamaan GESI di Indonesia

Sedangkan dalam konteks Indonesia, tahapan **implementasi advokasi GESI** dikembangkan sebagai **bentuk pengarusutamaan GESI**. Konsep advokasi terkait GESI dalam infrastruktur di Indonesia merupakan bagian dari program bernama Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUG-PUPR). Program ini merupakan perwujudan dari Surat Keputusan Menteri PUPR nomor 473/KPTA/M/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender di Lingkungan PUPR¹¹. Oleh karena itu, program PUG-PUPR dapat dijadikan contoh nyata dari aktivitas advokasi GESI dalam infrastruktur, sebagai salah satu kegiatan pengarusutamaan GESI di Indonesia.

Berdasarkan komitmen tentang pengarusutamaan GESI yang tercantum dalam PUG-PUPR, tujuan dan manfaat dari advokasi GESI dalam infrastruktur di Indonesia adalah; **Tujuan Pengarusutamaan GESI di Indonesia**, Memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur telah responsif gender, artinya tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur. Sedangkan **sasaran praktis dari advokasi GESI dalam infrastruktur Indonesia** adalah:

1. Terintegrasinya perspektif gender ke dalam budaya sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender seperti:
 - Terciptanya komitmen dari pemerintah dan staf Kementerian PUPR untuk melaksanakan pengarusutamaan GESI
 - Terciptanya kelembagaan dan institusi yang mendukung
 - Pembinaan SDM yang responsif gender
 - Penyediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian PUPR yang responsif gender
2. Terintegrasinyaperspektif gender ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, sehingga menghasilkan infrastruktur yang berkeadilan bagi semua kelompok dan transparan.

¹¹Profil Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diakses dari <http://pug-pupr.pu.go.id/content/show/24/sejarah>



Bab II

Merancang Riset Aksi dalam Pembangunan Infrastruktur yang Responsif GESI

A Mengenal Riset dan Manfaatnya

Pada bab sebelumnya telah dibahas penjelasan dari strategi dan sasaran pengarusutamaan GESI di infrastruktur Indonesia, terutama pada tataran teori dan konsep. Dalam praktiknya, implementasi advokasi GESI dalam infrastruktur terwujud dalam bentuk penelitian dan riset. Argumen ini disampaikan dalam acara *Knowledge Sharing Session* yang diadakan oleh Bappenas dan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) pada tanggal 7 Desember 2016 tentang Perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Riset untuk Pembangunan, yaitu;

“Hal pertama yang perlu dipahami khususnya oleh para peneliti dan pembuat kebijakan adalah bahwa alur strategi riset GESI harus untuk perubahan, bukan riset semata untuk riset itu sendiri. Sehingga seluruh langkah penelitian mulai dari disain, pendekatan, metode pengumpulan data, cara membaca dan menganalisis data, membuat rekomendasi dan kesimpulan didasari oleh pemahaman yang kuat tentang bagaimana pengelolaan pengetahuan untuk perubahan yang inklusif¹².”

Maka dengan demikian **riset** dapat dimaknai sebagai salah satu **bentuk aktivitas advokasi** GESI dalam infrastruktur; dimulai dari definisi ruang lingkup, tahapan perencanaan, hingga implementasi; dengan hasil utama berupa **perubahan yang inklusif**.

¹²Perspektif GESI dalam R&D untuk Kebijakan Publik yang Inklusif

Mempertegas pernyataan tersebut, **Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** secara lugas menyatakan bahwa Pemerintah wajib mempertimbangkan seluruh pandangan dan masukan dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perumusan kebijakan strategis; termasuk hasil riset yang disusun oleh kelompok masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh tahapan program pembangunan di Indonesia, sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus didasari oleh riset.

Meskipun posisi riset sebagai landasan pembangunan untuk perubahan yang inklusif sedemikian penting namun pelaksanaan riset masih terkesan dilakukan oleh kalangan tertentu saja; universitas/akademisi, pemerintah, atau sektor bisnis untuk kepentingan operasi usaha mereka. Kita belum banyak menemukan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) kecuali organisasi yang murni berbasis riset atau berbasis advokasi, meletakkan kegiatan riset sebagai salah satu agenda rutin di organisasi. Hal ini karena beberapa paradigma umum seperti; riset adalah kegiatan yang rumit, memakan banyak tenaga, biaya, dan waktu, SDM di organisasi tidak memiliki keahlian riset dan lain sebagainya. Pandangan ini jelas kurang tepat mengingat pada prinsipnya semua kalangan dapat melakukan riset untuk tujuan dan menggunakan metodologi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Bagian selanjutnya dalam panduan ini akan menjelaskan tentang Riset Aksi sebagai salah satu metode sederhana yang dapat dipergunakan oleh OMS sebagai bagian dari advokasi terhadap kebijakan, tanpa meninggalkan prinsip partisipatif yang menjadi dasar gerakan masyarakat.



A.1 Riset Aksi Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Riset Aksi atau disebut juga dengan Riset Aksi Partisipatoris (RAP)¹³ adalah kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat dalam suatu komunitas atau lingkup yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif – perubahan kondisi hidup yang lebih baik – Dengan demikian, sesuai dengan namanya Riset Aksi memiliki **tiga pilar** utama yakni **metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi**. Hal ini mengandung arti bahwa Riset Aksi dilaksanakan dengan mengacu pada metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat atau komunitas sebagai pelaksana dalam aktivitas riset.

Dalam Riset Aksi, metodologi dikembangkan berdasarkan metode riset pada umumnya. Namun perbedaan mendasar antara Riset Aksi dengan riset konvensional adalah dalam Riset Aksi, peneliti/praktisi tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan juga melebur di dalamnya dan bekerja bersama masyarakat atau komunitas dalam melakukan riset. Riset Aksi membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna yang berlaku di situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut. **Riset Aksi** tidakbisa lagi berposisi “**bebas nilai**” dan **tidak memihak** seperti yang dituntut ilmu pengetahuan sebagai syarat obyektivitas, **melainkan** harus **memihak kepada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban**. Tabel berikut akan menggambarkan perbedaan karakteristik riset konvensional dengan Riset Aksi.¹⁴

Riset Konvensional	Riset Aksi
1. Praktisi berperan sebagai pengamat dalam proses riset	1. Praktisi riset aksi juga berperan sebagai peserta dalam proses penelitian
2. Desain riset dibangun berdasarkan pengetahuan akademis murni	2. Riset aksi menggabungkan pengetahuan akademis murni dengan pengetahuan umum masyarakat
3. Topik riset bebas tidak terbatas	3. Secara khusus mempelajari topik mengenai ketidakseimbangan dalam masyarakat
4. Bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan mendorong timbulnya pertanyaan baru	4. Bertujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kepedulian
5. Praktisi bersifat bebas nilai	5. Praktisi memiliki landasan ideologi/politik tertentu
6. Praktisi hanya mengumpulkan data mentah dari peserta	6. Praktisi mengupayakan agar peserta memberikan data yang baik
7. Desain riset disusun secara pribadi oleh praktisi	7. Riset aksi merupakan hasil kolaborasi antara praktisi dengan seluruh pihak terkait

TABEL 2. Perbandingan Karakteristik Riset Aksi dengan Riset secara Umum

¹³<http://lingkarism.com/apa-itu-riset-aksi-partisipatoris-rap/>

¹⁴ibid, hal.35

A.2. Mengapa Riset Aksi Dilakukan ?

Riset Aksi lahir dan awalnya berkembang di Amerika Serikat, pencetus ide awal riset aksi adalah John Collier pada tahun 1930-an dan Kurt Lewin pada tahun 1940-an dengan yang berpendapat bahwa " Manusia akan lebih termotivasi dalam melakukan tugas/pekerjaan apabila dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang bagaimana pekerjaan mereka akan dijalankan.¹⁵ Gagasan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam 5 siklus tahapan yakni: amati (*observe*), renungkan (*reflect*), lakukan (*act*), Evaluasi (*evaluate*) dan modifikasi (*modify*).

Oleh karena itu sebuah riset aksi selalu dilakukan dalam kerangka advokasi sebuah perubahan yang bertujuan untuk mengubah atau memperkuat sebuah kondisi menjadi lebih baik dan lebih berpihak pada semua elemen masyarakat di suatu wilayah tertentu.

A.3. Tujuan, Manfaat, dan Prinsip Riset Aksi

Maka sesuai dengan definisi Riset Aksi, tujuan riset aksi adalah:

1. Untuk membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat arus bawah melalui pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog publik, dll
2. Untuk mengubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi
3. Untuk menggeser paradigma: masyarakat sebagai Objek bukan Subjek penelitian
4. Untuk membawa perubahan (*transformation*) nilai sosial di masyarakat.

Pola advokasi yang efektif adalah advokasi yang menentang ketidakseimbangan kekuasaan dan mampu mengubah cara berpikir. Pada hakekatnya tidak ada bentuk aksi yang murni, oleh karena itu manfaat riset aksi dalam kerangka advokasi merupakan bagian dari kerangka advokasi yang berpusat pada kepentingan warga yakni merupakan strategi mendukung dan membuat warga/masyarakat mampu bernegosiasi secara lebih baik demi kepentingan diri mereka sendiri untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan pemenuhan hak asasinya.

Sementara sesuai dengan 3 pilar dalam Riset Aksi, dalam pelaksanaannya Riset Aksi harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut;

¹⁵ <https://saidugm.blogspot.com/2015/04/sejarah-riset-aksi-dan-posisinya-dalam.html>

Partisipasi. Riset Aksi harus dilaksanakan se-partisipatif mungkin, melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, Riset Aksi dilakukan bersama di antara masyarakat warga melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan yang melatarbelakangi warga saat terlibat dalam Riset Aksi, termasuk penghargaan pada kesetaraan jender (terlebih jika dalam suatu komunitas warga perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi sosial). Berbeda dengan riset konvensional, tim peneliti dalam Riset Aksi bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara warga, bukan tim peneliti yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing.

Orientasi Aksi. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam Riset Aksi harus mengarahkan masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, Riset Aksi harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret.

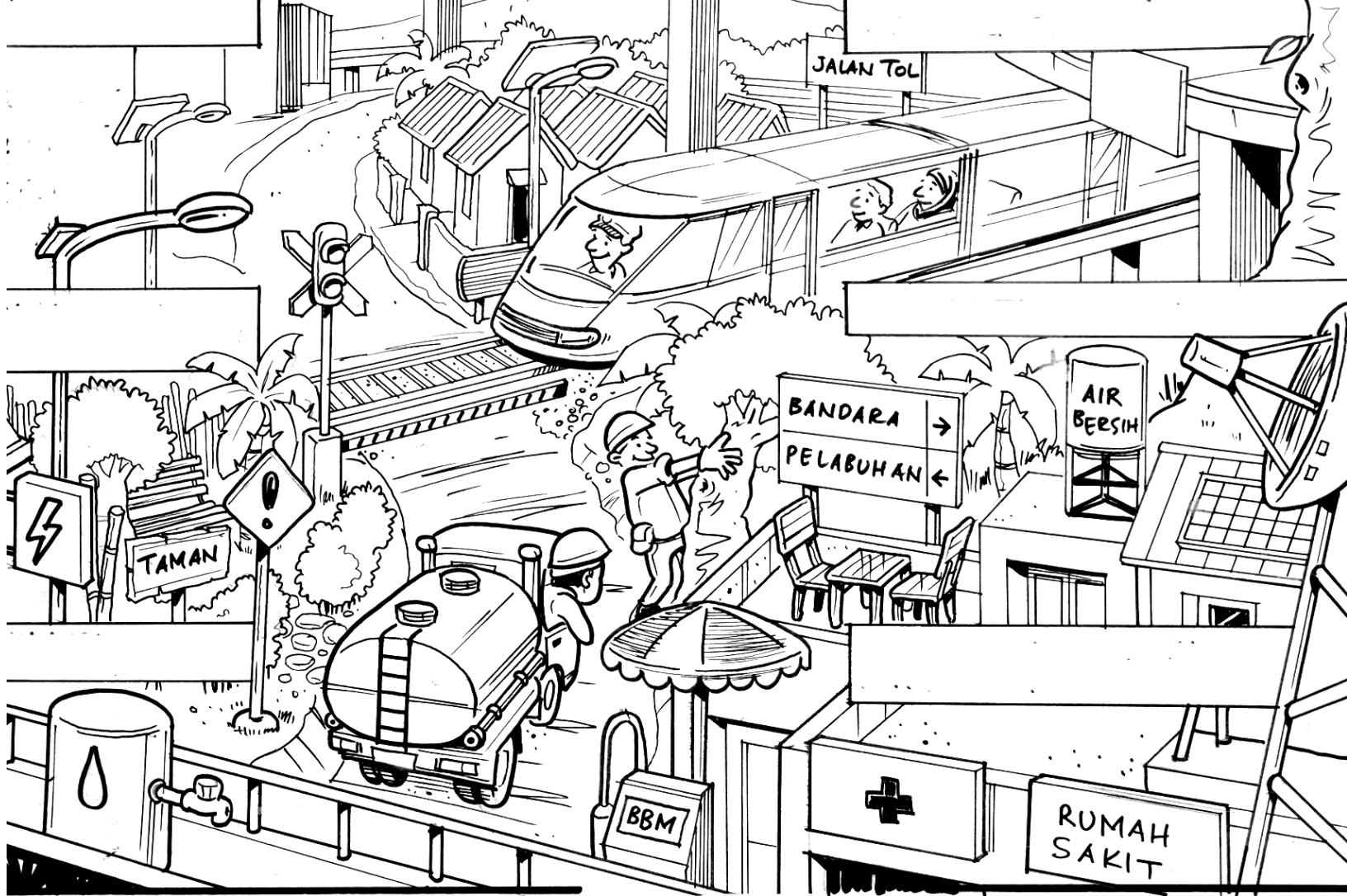
Triangulasi. Riset Aksi harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama warga terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga/elemen masyarakat (crosscheck). Prinsip ini menuntut Riset Aksi mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan. Sedangkan data-data sekunder (riset lain, kepustakaan, statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembandingan.

Luwes atau Fleksibel. Meskipun Riset Aksi dilakukan dengan perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati, peneliti bersama warga harus tetap bersikap luwes menghadapi perubahan situasi yang mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Bukan situasinya yang dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

A.4. Sektor-Sektor Tujuan Perubahan Kegiatan Riset Aksi

Riset aksi yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah perubahan kondisi yang dilakukan secara partisipatoris ini bisa dilakukan terkait dengan perubahan di beberapa sektor diantaranya: perubahan kebijakan atas tatanan di bidang: 1) infrastruktur: jalan, gedung pemerintahan dan gedung-gedung fasilitas publik, 2) fasilitas kebutuhan dasar (air minum, listrik, dll), 3) transportasi (darat, laut, udara), 4) kerusakan lingkungan (darat, laut, udara), pelayanan kesehatan, pendidikan dan perumahan, serta 5) kondisi sosial kemasyarakatan (kebijakan untuk keluarga miskin, lansia, dll).





A.5. Infrastruktur yang Responsif GESI

Selain pemahaman mengenai Riset Aksi sebagai bentuk metode riset yang sesuai dengan advokasi GESI dalam infrastruktur Indonesia, diperlukan juga pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan infrastruktur yang sesuai dan responsif GESI.

Konsep infrastruktur klasik pada umumnya dikembangkan seputar permodalan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan produksi ekonomi, seperti transportasi, pengolahan pengairan (irigasi, bendungan), pengolahan sampah, distribusi energi, telekomunikasi, dan lain-lain¹⁶. Konsep infrastruktur di Indonesia berkaitan erat dengan *Social Overhead Capital*, yaitu segala bentuk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, definisi dari infrastruktur di Indonesia mengacu pada Permen PUPR No 30/2006 tentang Aksesibilitas Gedung Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dalam peraturan tersebut, infrastruktur terbagi dalam:

¹⁶Prud'homme (2004), hal.4

1. Fungsi hunian, meliputi: rumah susun, rumah flat, asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll;
2. Fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta bangunan keagamaan lainnya;
3. Fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran, kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang perdagangan, gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api;
4. Fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung konferensi;
5. Fungsi khusus meliputi: bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan;
6. Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat pemakaman umum dan ruang publik lainnya.

Selain itu pembangunan gedung sebaiknya menerapkan prinsip desain universal (*universal design*) dalam setiap rancangannya yang bertujuan agar semua orang dapat mengakses seluruh ruangan di dalam gedung tersebut. Hal ini sudah diatur pula dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Desain universal memiliki 7 prinsip yang menyediakan kesetaraan dalam aksesibilitas. Berikut ini rincian 7 prinsip dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).¹⁷

1. Kesetaraan Penggunaan

Desain bangunan dapat digunakan oleh semua orang dengan kemampuan yang berbeda. Artinya, setiap bentuk, fungsi dan fasilitas pada bangunan itu dapat memenuhi kebutuhan penggunanya.

2. Fleksibel

Desain bangunan dan setiap ruang di dalamnya mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunanya.

3. Penggunaan yang simpel dan sesuai kebutuhan

Setiap fungsi pada bangunan harus mudah dimengerti oleh penggunanya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, bahasa, kemampuan dan tingkatan intelektualitasnya.

4. Informatif dan mudah dimengerti

Desain mudah dimengerti untuk setiap kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.

¹⁷ <https://difabel.tempo.co/read/1140803/7-prinsip-desain-universal-agar-bangunan-ramah-disabilitas/full&view=ok>

5. Antisipatif

Desain dapat meminimalisir dan memiliki toleransi pada kesalahan pemakaian. Setiap bentuk pada bangunan dapat mengantisipasi kecelakaan hingga kondisi tidak terduga.

6. Tidak memerlukan usaha terlalu besar

Desain bangunan harus dapat digunakan secara efisien, nyaman dan tidak menyebabkan kelelahan dalam penggunaannya.

7. Memiliki pendekatan terhadap kebutuhan ukuran dan ruang

Desain bangunan mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi fisik, ukuran serta tingkat fleksibilitas penggunaannya.

Selain kesesuaian dengan desain universal dalam Permen PUPR No 30/2006 tentang Aksesibilitas Gedung Pemerintahan juga menyertakan Azas Pembangunan Infrastruktur, yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas tersebut harus dibangun dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Seluruh fasilitas yang termasuk ke dalam fungsi tersebut, termasuk dalam definisi infrastruktur di Indonesia dan dapat dijadikan topik advokasi GESI dalam infrastruktur. Untuk mencermati implementasi aspek GESI dalam infrastruktur tersebut, dapat digunakan definisi World Bank mengenai ketidaksetaraan gender, yaitu;¹⁸

- Memperhatikan apakah fungsi dan kegunaan dalam azas infrastruktur yang ada memberikan keuntungan yang sama serta tidak membawa kerugian, baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan.
- Memperhatikan apakah terdapat ketidakseimbangan dalam sudut pandang kebiasaan masyarakat mengenai akses terhadap fungsi azas infrastruktur tersebut.

¹⁸World Bank (2009), hal.16

Dengan menggunakan Permen PUPR No 30/2006 dan definisi World Bank, dapat dibentuk matrikulasi sebagai berikut:

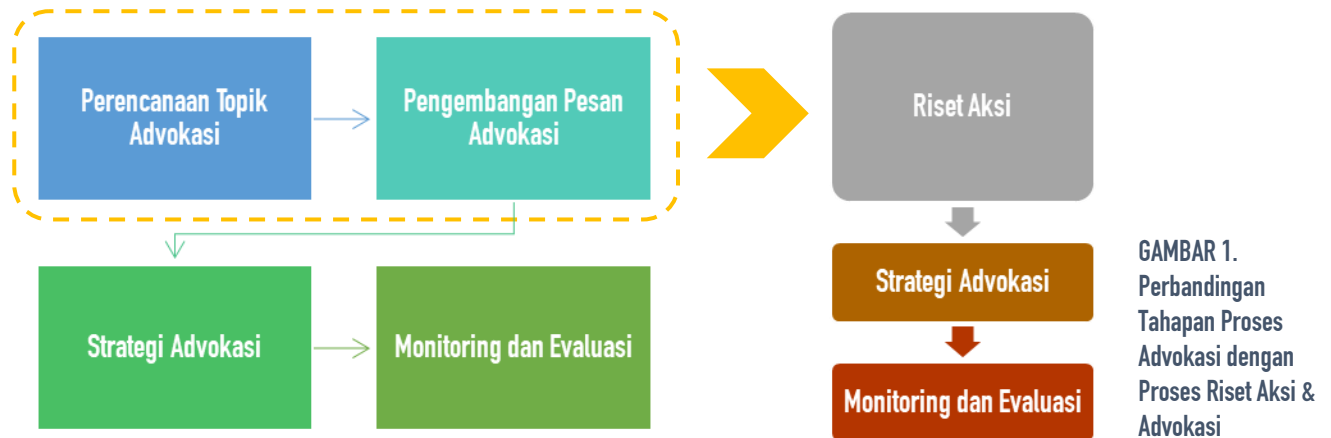
Jenis Fungsi Infrastruktur	Kelengkapan Infrastruktur	Azas Manfaat Infrastruktur	Analisis Implementasi GESI dalam Infrastruktur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi hunian 2. Fungsi keagamaan 3. Fungsi usaha 4. Fungsi sosial dan budaya 5. Fungsi khusus 6. Fasilitas umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu 2. Ram/jalur landai 3. Tangga 4. Lift 5. Eskalator 6. Toilet 7. Pancuran 8. Wastafel 9. Telepon 10. Perabot 11. Perlengkapan dan Peralatan 12. Jalur pedestrian 13. Jalur pemandu 14. Area parkir 15. Rambu dan Marka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan 2. Kemudahan 3. Kegunaan 4. Kemandirian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah azas infrastruktur tersebut memberikan manfaat yang setara pada perempuan, kaum disabilitas, dan anak-anak? 2. Apakah ada kebiasaan dalam masyarakat yang menyebabkan perempuan, kaum disabilitas tidak mendapatkan manfaat tersebut?

TABEL 3. Pedoman Analisis Aplikasi GESI dalam Infrastruktur

Tabel tersebut dapat dipergunakan untuk memandu pola pikir dalam menganalisa implementasi GESI dalam infrastruktur Indonesia, dimulai dari jenis fasilitas infrastruktur, kelengkapan yang dimiliki, manfaat yang diberikan, hingga akhirnya aspek implementasi gesi dengan mencermati apakah manfaat tersebut juga menguntungkan perempuan, kaum disabilitas, dan anak-anak secara setara.

B Riset Aksi pada Sektor Infrastruktur

Dalam modul ini, riset aksi disusun dengan pemahaman sebagai perwujudan aktivitas advokasi. Maka dengan demikian tahap dan susunan riset aksi akan disesuaikan dengan tahapan proses advokasi.



Kedua bagan tersebut menunjukkan adaptasi model tahapan implementasi Advokasi UNICEF ke dalam bentuk tahapan implementasi advokasi di Indonesia, dengan menggunakan Riset Aksi.

Bagan di atas juga menunjukkan bagaimana sebuah riset aksi dilakukan untuk memperkuat proses advokasi dari kelompok masyarakat ataupun lembaga non pemerintah sehingga kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui proses monitoring dan evaluasi yang berbentuk riset secara partisipatoris maka kondisi / kebijakan tersebut bisa diperbaiki yang berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

B.1 Tahap-Tahap Riset Aksi pada Sektor Infrastruktur

Riset Aksi merupakan metode riset yang memberi ruang lentur bagi semua kalangan untuk dapat melakukan kegiatan advokasi berbasis bukti. Meski bersifat dinamis riset aksi tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah (metodologi) riset pada umumnya. Selain untuk tetap menjaga obyektifitas atas isu yang menjadi subyek advokasi, hal ini juga untuk menjaga akuntabilitas dari riset yang dilakukan sehingga tetap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Secara umum terdapat 3 tahapan utama dalam kegiatan Riset Aksi yakni;

1. Penyusunan Proposal/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Proposal adalah rancangan riset berupa uji empirik dari sebuah isu atau pertanyaan, menggunakan metodologi sebuah bidang pengetahuan tertentu¹⁹.

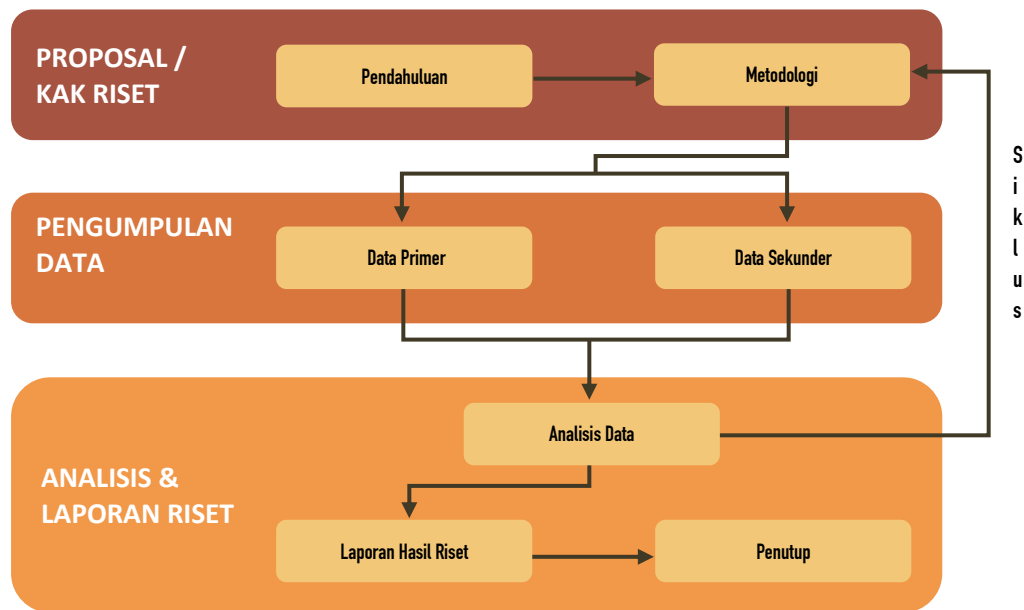
2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas observasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam riset, secara sistematis dan terstandardisasi menurut metodologi riset yang telah ditentukan²⁰.

3. Analisis & Penulisan Laporan

Laporan hasil riset adalah laporan mengenai data dan hasil analisa sebuah riset, yang disusun berdasarkan aturan-aturan penulisan karya ilmiah²¹.

Selain ketiga tahapan tersebut, salah satu mekanisme Riset Aksi adalah memiliki proses yang berbentuk siklus, yaitu proses pengulangan kembali ke tahap perencanaan dan melakukan modifikasi-modifikasi terhadap rancangan riset. Berbeda dengan riset dan penelitian bentuk lainnya yang berjalan searah, dalam Riset Aksi praktisi memiliki kebebasan untuk mengulang kembali proses rancangan dan implementasi riset, dengan tujuan mendapatkan output riset yang lebih maksimal. Perhatikan gambar berikut.



GAMBAR 2. Tahapan dan Siklus Riset Aksi

¹⁹Riduwan (2015), hal.1-2

²⁰Arikunto (2014), hal.265

²¹Arikunto (2014), hal.395

Dua hal yang pada umumnya dilakukan dalam proses penguatan ini adalah:

1. Penyesuaian rancangan riset dalam aspek konseptual maupun metodologis, untuk lebih menyesuaikan implementasi riset dengan konteks masyarakat lokal
2. Pembekalan atau penguatan yang diberikan terhadap seluruh peserta riset, untuk mendapatkan output data lapangan yang lebih ideal.

Alur siklus dalam Riset Aksi tidak bersifat wajib dan pada umumnya dilakukan berdasarkan ketidakpuasan dari praktisi atau pihak lain, terkait data lapangan yang didapatkan ataupun hasil analisis data. Tidak jarang pula dalam proses siklus, praktisi melibatkan seluruh stakeholder terkait; termasuk peserta riset, masyarakat lokal, konsultan dan tokoh masyarakat, NGO, dan seluruh pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk meningkatkan rancangan dan hasil riset.



B.2 Pelibatan Pemangku Kepentingan Kunci Kegiatan Riset Aksi

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah orang-orang yang terlibat, mempengaruhi, dan peduli serta mengambil peran dalam isu dalam organisasi²². Analisis stakeholder berguna untuk mengetahui siapa saja mereka dan bagaimana sudut pandang mereka serta tingkat pengaruh mereka terhadap isu yang hendak diangkat. Analisis stakeholder merupakan aspek khas Riset Aksi yang dikembangkan dalam rangka advokasi, karena Riset Aksi murni berdasarkan penelitian, pada umumnya tidak melakukan analisa ini. Namun dalam advokasi, tujuan utama dari Riset Aksi adalah menghasilkan output yang mampu mempengaruhi stakeholders dan kebijakan; oleh karena itu harus menyertakan analisis dan pelibatan para stakeholder terkait.

Berikut adalah matrikulasi yang dapat membantu dalam analisis stakeholder, berdasarkan posisi kekuatan mereka sebagai stakeholder, serta tindakan yang sesuai.²³

Stakeholder	Keterlibatan Tinggi	Keterlibatan Rendah
Pengaruh Tinggi	<p>Stakeholder kunci/audiens (Puaskan)</p> <p>Cari tahu posisi dan arah kepentingan mereka berkaitan dengan isu dalam infrastruktur, lalu kembangkan pesan advokasi yang sesuai, sebagai target audiense dari proses advokasi</p> <p>Contoh: Pemerintah lokal, Lembaga Donor, Media</p>	<p>Stakeholder pendukung (Konsultasikan)</p> <p>Stakeholder dari bidang yang berbeda. Lakukan konsultasi dan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan keputusan yang mereka lakukan, sebagai narasumber pendukung</p> <p>Contoh: NGO lokal, Pemerintah Pusat</p>
Pengaruh Rendah	<p>Stakeholder target riset (Libatkan)</p> <p>Umumnya berupa pihak yang paling dipengaruhi oleh kebijakan advokasi yang dirancang. Libatkan sepenuhnya dalam proses Riset Aksi dan Advokasi</p> <p>Contoh: Kelompok perempuan dan penyandang disabilitas</p>	<p>Stakeholder lain (Observasi)</p> <p>Tidak berada dalam posisi yang vital langsung ataupun keterlibatan langsung, berkaitan dengan advokasi. Awasi dan libatkan bila perlu.</p> <p>Contoh: Perusahaan, pengusaha lokal, tokoh masyarakat</p>

TABEL 4. Matrikulasi Pemetaan Stakeholder

Dengan menggunakan matriks sederhana tersebut, dapat diidentifikasi dan dikategorikan seluruh stakeholder dari Riset Aksi dan advokasi GESI dalam infrastruktur.

²²Bryson (2007), hal.22

²³Edlestone et al (2013), hal.29

B.3 Evaluasi Kapasitas

Salah satu rintangan utama dalam proses pelaksanaan riset keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak praktisi riset. Oleh karena itu, selain pemahaman mengenai Infrastruktur dalam GESI, tahapan riset, dan pemetaan stakeholder terkait, salah satu aspek penting lain yang harus dilakukan dalam proses penyusunan riset adalah evaluasi mengenai evaluasi mengenai sumber daya yang dimiliki dan proses pembekalan terkait proses pelaksanaan riset. Dengan melakukan proses ini, akan didapatkan gambaran mengenai kapasitas praktisi dalam melaksanakan proses Riset Aksi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan akhir perencanaan, sebelum dimulainya proses penulisan proposal riset.

Mengingat konteks Riset Aksi sebagai dasar advokasi GESI dalam infrastruktur, maka mekanisme evaluasi kapasitas dan pembekalan yang dikembangkan tidak hanya terbatas pada riset aksi, namun juga memperhitungkan kapasitas dalam implementasi advokasi. Berikut adalah contoh metode evaluasi kapasitas advokasi yang dikembangkan oleh UNICEF²⁴.

Kredibilitas		Checklist
1	Tim Praktisi dikenal dan diakui oleh pihak pengambil keputusan terkait GESI dalam infrastruktur.	
2	Tim praktisi memiliki legitimasi/otoritas untuk mewakili stakeholders terkait GESI dalam infrastruktur.	
3	Tim praktisi memiliki landasan ideologi yang berpihak pada kelompok perempuan, disabilitas, dan anak.	
4	Tim praktisi dipandu oleh tokoh berpengalaman dalam bidang perempuan, disabilitas, dan anak.	
Kemampuan personal		Checklist
1	Tim praktisi memiliki pemahaman terkait GESI di Indonesia.	
2	Tim praktisi memiliki pemahaman terkait infrastruktur di Indonesia.	
3	Tim praktisi memiliki keterampilan terkait pengumpulan dan evaluasi data lapangan.	
4	Tim praktisi memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara umum.	
Organisasi		Checklist
1	Tim praktisi memiliki struktur organisasi yang jelas.	
2	Tim praktisi memiliki pembagian kerja/SOP yang jelas.	
3	Tim praktisi lancar berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain.	
4	Tim praktisi memiliki mekanisme kontrol dan evaluasi kerja.	
Pembentukan Pesan		Checklist
1	Tim praktisi memahami metodologi perencanaan riset, pengumpulan dan analisa data, serta penyusunan laporan riset GESI dalam infrastruktur	
2	Tim praktisi memiliki kepekaan/pengalaman dalam mengidentifikasi data-data riset yang dapat digunakan sebagai pembentukan pesan advokasi GESI dalam infrastruktur	

TABEL5. Evaluasi Kapasitas Praktisi dalam Riset Aksi & Advokasi

²⁴Cohen (2010), hal.17

Manajemen Resiko		Checklist
1	Tim praktisi memiliki kemampuan dalam menganalisis keunggulan dan resiko jangka pendek dan jangka panjang dari implementasi riset aksi dan advokasi GESI dalam infrastruktur	
2	Tim praktisi memiliki kemampuan dalam menganalisis potensi hambatan dan tantangan dalam implementasi riset aksi dan advokasi GESI dalam infrastruktur	
3	Tim praktisi memiliki tindak lanjut bagi setiap potensi hambatan dan tantangan dalam implementasi riset aksi dan advokasi GESI dalam infrastruktur	
4	Tim praktisi mampu menganalisa dan memprediksi setiap kebutuhan yang diperlukan dalam proses implementasi riset aksi dan advokasi, mulai dari finansial, SDM, hingga rentang waktu	
Kapasitas Interaksi		Checklist
1	Tim praktisi memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompok perempuan, disabilitas, dan anak	
2	Tim praktisi memahami konteks kebiasaan dan budaya lokal, terkait kelompok perempuan, disabilitas, dan anak	
3	Tim praktisi memiliki kemampuan dalam mendukung dan mengembangkan partisipasi kelompok perempuan, disabilitas, dan anak dalam proses riset dan advokasi	
Networking		Checklist
1	Tim praktisi memiliki kontak/koneksi ke pihak pemerintah terkait bidang GESI dan infrastruktur	
2	Tim praktisi memiliki kontak/koneksi pada kelompok perempuan, disabilitas, dan anak di lingkungan lokal	
3	Tim praktisi memiliki kontak/koneksi pada NGO, tokoh masyarakat, sektor privat, atau narasumber potensial lainnya	
Sumber Daya		Checklist
1	Tim praktisi mampu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur lokal (transportasi, akomodasi, dll) bagi proses implementasi riset aksi dan advokasi	
2	Tim praktisi memiliki sumber daya yang mencukupi untuk implementasi riset aksi dan advokasi, baik finansial, SDM, hingga kesediaan waktu	
3	Tim praktisi mampu mengakses sumber-sumber data lokal terkait dengan GESI dalam infrastruktur	

TABEL 5. Evaluasi Kapasitas Praktisi dalam Riset Aksi & Advokasi

Tabel di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kapasitas. Sangat disarankan untuk dapat memenuhi seluruh poin evaluasi tersebut sebelum merancang proposal riset; baik dengan cara penguatan kapasitas sumberdaya riset ataupun pemberdayaan anggota tim praktisi.

B.4 Melaksanakan Riset Aksi

B.4.1 Menyusun Proposal/KAK Riset Aksi

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pelaksanaan Riset Aksi terbagi menjadi 3 tahapan utama. Tahapan penyusunan proposal/KAK Riset Aksi merupakan tahap pertama yang harus dilakukan. **Proposal/KAK adalah rancangan riset berupa uji empirik dari sebuah isu atau pertanyaan, menggunakan metodologi sebuah bidang pengetahuan tertentu²⁵.** Proposal/KAK disusun dari **2 bagian utama**, yaitu **Pendahuluan** dan **Metodologi**. Pendahuluan berisi informasi deskriptif seputar penelitian; yang dalam hal ini adalah tema riset, mengapa riset ini dilaksanakan, dimana riset ini dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, apa yang diharapkan dari riset aksi ini, dan sebagainya; sedangkan Bagian Metodologi berisi tata cara pelaksanaan dan teknik-teknik riset yang akan digunakan dalam pelaksanaan Riset Aksi. Tujuan penulisan metodologi adalah agar pembaca dapat memahami aspek teoritis dari Riset Aksi yang disusun.

Berikut adalah panduan penulisan untuk tiap-tiap bagian dalam proposal/KAK Riset Aksi.

B.4.1.1 Latar Belakang Riset

Latar Belakang Riset adalah narasi mengenai kondisi yang menjadi sebab riset ini dilakukan. Tidak terdapat pedoman standar dalam penulisan Latar Belakang Riset, namun pada umumnya alur narasi dalam Latar Belakang Riset adalah sebagai berikut.

- **Bagian 1**– Penjelasan mengenai kondisi lapangan yang kurang baik
- **Bagian 2**– Penjelasan mengenai bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi masyarakat

Contoh 1. Latar Belakang Riset HWDI NTB

Jumlah penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 16.976 orang. Dan 932 orang berdomisili di kota Mataram. Jumlah yang cukup besar ini berpotensi untuk mendorong peningkatan layanan publik yang inklusif. Namun, perspektif penyelenggara layanan publik (pemerintah) menempatkan penyandang disabilitas sebagai masalah, alih-alih potensi yang menggerakkan. Sehingga penyandang disabilitas tetap menjadi warga negara kelas dua yang tidak mendapatkan ruang partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan publik. Terbatasnya ruang partisipasi bagi kelompok ini dalam penggalan kebutuhan di forum-forum perencanaan, mulai dari level desa/kelurahan hingga nasional, berdampak pada lemahnya responsivitas pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

²⁵Riduwan (2015), hal.1-2

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi terlaksananya perencanaan pembangunan desa yang inklusif, terutama bagi kelompok keluarga miskin, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas lainnya, serta penganggaran desa yang transparan. Sementara di tingkat Kelurahan, pemerintah akan mulai tahun ini mengalokasikan Dana Kelurahan Rp 3 triliun pada APBN 2019 yang dapat dialokasikan; Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana prasarana lainnya. Kedua, pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

Penyandang disabilitas harus diberikan ruang ruang untuk berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan agar dapat mendapatkan manfaat yang setara dari setiap dana public yang dibelanjakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) mempertegas hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Negara, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, yaitu hak: (s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; dan (v) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi.

Guna mempercepat pemenuhan hak-hak lainnya, hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mesti dipenuhi oleh negara. UUPD menjelaskan bahwa aksesibilitas mengacu kepada kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Perencanaan pembangunan infrastruktur sejauh ini tidak melibatkan kelompok difabel. Padahal, aksesibilitas menjadi salah satu asas dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyediaan kesempatan atas akses yang setara bagi semua warga Negara. Cakupan akses infrastruktur yang wajib dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam UUPD Pasal 97, meliputi: (1) bangunan gedung, (2) jalan, (3) permukiman, dan (4) pertamanan dan pemakaman.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran kelompok penyandang disabilitas akan hak-haknya, semakin dirasakan mendesak adanya kesempatan yang setara bagi kelompok disabilitas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya proses perencanaan pembangunan yang selama ini berdasarkan kondisi faktual masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas.

Berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya penyandang disabilitas memiliki keterbatasan-keterbatasan khusus untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan kelompok lainnya. Demikian pula, akibat stigma, cara pandang yang diskriminatif, dan tekanan social mulai dari lingkungan terdekat dalam keluarga hingga lingkungan sosialnya banyak hambatan yang harus dihadapi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses-proses perencanaan. Padahal diyakini bahwa kebijakan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur sulit diharapkan akan responsive terhadap penyandang disabilitas jika kelompok ini tidak ikut mengambil bagian dalam ruang pengambilan keputusan yang merupakan area yang padat dengan ragam kelompok kepentingan yang berbeda, baik dari tingkat musyawarah dusun/lingkungan hingga tingkat lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut maka harus ada upaya untuk mendorong sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsive terhadap kelompok disabilitas. Upaya ini harus dibimbing oleh kesadaran bahwa ada sejarah keterpinggiran penyandang disabilitas dalam proses perencanaan disebabkan faktor-faktor cultural sekaligus struktural, sehingga dalam mendorong sistem tersebut haruslah menganut nilai-nilai emansipatori, rekognisi sekaligus inklusivisme. Sehingga perubahan system perencanaan tersebut juga dapat disertai dengan kebijakan pemajuan bagi percepatan pemberdayaan kelompok disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Kelompok disabilitas juga perlu terlibat dalam melakukan monitoring terhadap rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan sehingga implementasi kegiatan pembangunan infrastruktur benar-benar dapat menjawab kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan cara pandang itulah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi NTB memandang penting untuk melaksanakan studi ini yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan guna mengembangkan model sistem perencanaan dan monitoring pembangunan infrastruktur yang responsif disabilitas.

B.4.1.2 Tujuan Riset

Tujuan Riset adalah bagian singkat yang berisi penjelasan mengenai judul riset, dan bagaimana oleh riset ini dapat memperbaiki kondisi yang digambarkan dalam Latar Belakang Riset. Tujuan Riset lebih singkat dan padat dari Latar Belakang Riset.

Contoh 2. Tujuan Riset HWDI NTB

Tujuan riset ini ingin menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran mengenai kondisi partisipasi kelompok disabilitas terhadap proses perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Lingkungan hingga MPBM Kota Mataram?
2. Bagaimana sistem dan mekanisme perencanaan dan monitoring perencanaan pembangunan infrastruktur yang responsif disabilitas yang mungkin dilaksanakan?
3. Apa saja pilihan strategi pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa?

Contoh 3. Tujuan Riset FLLAJ NTB

Tujuan Penelitian / Riset Aksi :

1. Mengetahui karakteristik dan pola pejalan kaki di Kota Mataram
2. Menganalisis tingkat pelayanan jalur pedestrian yang ramah disabilitas di Kota Mataram
3. Mengevaluasi fasilitas dan infrastruktur jalur pejalan kaki di Kota Mataram untuk mengetahui kelayakannya terhadap penyandang disabilitas
4. Mengetahui tingkat kebutuhan fasilitas dan infrastruktur pedestrian yang ramah terhadap disabilitas di Kota Mataram
5. Merencanakan fasilitas dan infrastruktur pedestrian yang aksesibel untuk penyandang disabilitas

B.4.1.3 Manfaat Riset

Manfaat Riset adalah bagian singkat yang menjelaskan kegunaan yang didapatkan dari dilaksanakannya proses riset. Manfaat riset dapat berisi penjelasan mengenai kegunaan dalam bentuk teoritis, yaitu kegunaan dalam bentuk memperkaya wacana dan wawasan mengenai topik riset; ataupun dalam bentuk praktis, yaitu bentuk aktivitas/produk nyata yang dihasilkan dari dilaksanakannya proses riset.

Contoh 4. Manfaat Riset HWDI

Manfaat yang diharapkan melalui pelaksanaan riset ini, antara lain:

1. Hasil riset dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki system perencanaan dan monitoring proses perencanaan pembangunan daerah yang responsif disabilitas
2. Hasil riset dapat menjadi bahan refleksi bagi penyandang disabilitas mengenai pentingnya partisipasi dalam perencanaan dan monitoring perencanaan pembangunan daerah
3. Hasil riset dapat menjadi baseline data bagi CSOs untuk mendorong sistem perencanaan dan monitoring perencanaan pembangunan yang responsif disabilitas

Contoh 5. Manfaat Riset FLLAJ NTB

Manfaat yang diharapkan melalui pelaksanaan riset aksi ini adalah:

1. Bagi masyarakat, teridentifikasinya kekurangan kondisi eksisting dan kebutuhan infrastruktur bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus terkait dengan ruang mereka beraktivitas yang setara dengan masyarakat lainnya.
2. Bagi FLLAJ NTB, dapat menjadi modal pengalaman dalam mengelaborasi stakeholders terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur transportasi yang berpihak masyarakat penyandang disabilitas yang dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah dalam memahami kesetaraan hak dalam infrastruktur.
3. Bagi kelompok peneliti, untuk menambah pengalaman riset dan ilmu terkait fasilitas dan infrastruktur transportasi yang ramah disabilitas.
4. Bagi kelompok mahasiswa, dapat menjadikan penelitian / riset aksi ini sebagai referensi tentang penelitian partisipatoris / riset aksi serupa
5. Bagi pemerintah, sebagai referensi atau masukan agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan, dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas terutama pedestrian yang mudah dan nyaman untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas.

B.4.1.4 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dibentuk dari filosofi bahwa ilmu pengetahuan saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Kajian Pustaka dilaksanakan dengan untuk mendapatkan ide dan masukan mengenai tema dan proses pelaksanaan riset aksi serupa yang telah dilakukan oleh orang lain.

Tujuan-tujuan dari dilakukannya Tinjauan Pustaka, adalah:

- Untuk menunjukkan pemahaman praktisi terhadap disiplin ilmu yang digunakan dalam riset
- Untuk menunjukkan keterkaitan topik riset dengan riset-riset sejenis yang telah dilakukan
- Untuk meringkas dan mengintegrasikan metode, data, dan aspek-aspek relevan lainnya dari riset-riset serupa

Sumber Kajian Pustaka tidak terbatas, selama sumber tersebut terpublikasi dan memiliki relasi dengan tema riset. Beberapa contoh di antaranya:

- Artikel publikasi
- Jurnal ilmiah
- Buku
- Dokumen pemerintah
- Dokumen online

Berikut adalah 5 pokok pemikiran yang dapat digunakan dalam menyusun bagian isi kajian pustaka bagi tiap-tiap variabel:

- Konteks/deskripsi penelitian, buku, atau artikel
- Sejarah/ latar belakang penelitian, buku, atau artikel
- Tinjauan teoritis penelitian, buku, atau artikel
- Tinjauan metodologi penelitian, buku, atau artikel
- Tinjauan hasil keseluruhan, buku, atau artikel

Bagian isi dari setiap Kajian Pustaka dapat disusun berdasarkan acuan tersebut. Namun, tidak terdapat pedoman atau acuan khusus mengenai jumlah sumber yang harus dicantumkan dalam proposal Riset Aksi Partisipatoris. Oleh karena itu praktisi bebas menentukan jumlah sumber dalam Kajian Pustaka, sesuai dengan preferensi dan keperluan.

B.4.1.5 Bentuk Riset

Bagian ini berisi deskripsi singkat mengenai metode dan pendekatan riset yang kita pilih. Apabila praktisi mengikuti rekomendasi metode riset dalam modul, maka bagian Bentuk Riset akan berisi deskripsi mengenai metode Riset Aksi, pendekatan yang digunakan, serta penjelasan mengenai mengapa metode tersebut tersebut dianggap paling sesuai terkait dengan topik riset. Pada

dasarnya, bagian ini menjelaskan mengapa kita memiliki Riset Aksi dari seluruh bentuk penelitian yang ada.

Contoh 6. Bentuk Riset FLLAJ-NTB

Riset aksi dilakukan dengan metode survey langsung sebagai data primer dan melakukan home interview untuk kuisisioner sebagai data kualitatif riset. Data kuantitatif diperoleh dengan survey lapangan dengan menghitung Lalulintas Harian Rata-rata (LHR), inventarisasi geometric dan survey pejalan kaki.

B.4.1.6 Tahapan Riset

Tahapan Riset berisi penjelasan mengenai proses pelaksanaan riset, dimulai dari rancangan proposal riset hingga penulisan laporan. Selain dengan menggunakan narasi, bentuk lain yang populer dalam Tahapan Riset adalah menggunakan diagram yang menunjukkan seluruh aktivitas pada masing-masing tahapan riset. Dapat digunakan diagram tahap penelitian, sebagaimana dicantumkan dalam bagian **2.1. Tahap-Tahap Riset Aksi pada sektor infrastruktur**, atau membuat diagram baru yang lebih cocok dengan Riset Aksi yang dijalankan. Perhatikan contoh Tahapan Riset berikut

Contoh 7. Tahapan Riset FLLAJ-NTB (Narasi)

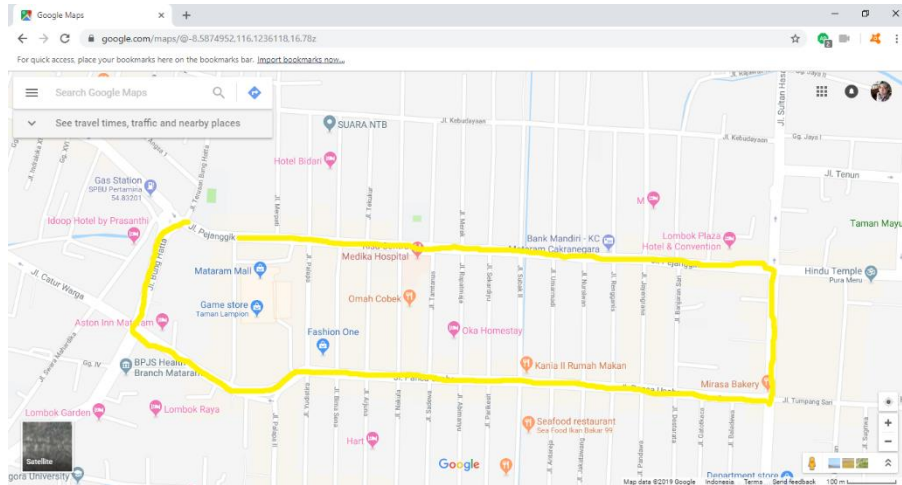
Dalam proses pelaksanaan riset aksi ini dilakukan mulai dari tahapan rapat pendahuluan hingga ekspose hasil secara detail rincian kegiatan riset aksi ini adalah sebagai berikut :

a) Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya tingkat kepadatan pengunjung dan jumlah fasilitas layanan umum yang ada pada ruas tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dipilih lokasi cluster cakranegara sebagai pusat perekonomian yang ada di kota mataram. Pada cluster ini diambil 4 ruas jalan sebagai berikut :

- Ruas Jalan Pejanggik.
- Ruas Jalan AA Gede Ngurah.
- Ruas Jalan Panca Usaha
- Ruas Jalan Bung Hatta

Secara detail lokasi dapat dilihat pada peta dibawah ini



Area yang akan diambil pada kegiatan riset aksi ini ialah area ruas yang ditandai dengan warna kuning pada gambar diatas. Lokasi ini merupakan pusat bisnis di area kota Mataram, selain pusat perbelanjaan terdapat pelayanan publik seperti rumah sakit, hotel, restaurant, tempat ibadah dan area wisata, sehingga area ini dianggap sangat cocok sebagai *pilot area* dilakukannya riset aksi.

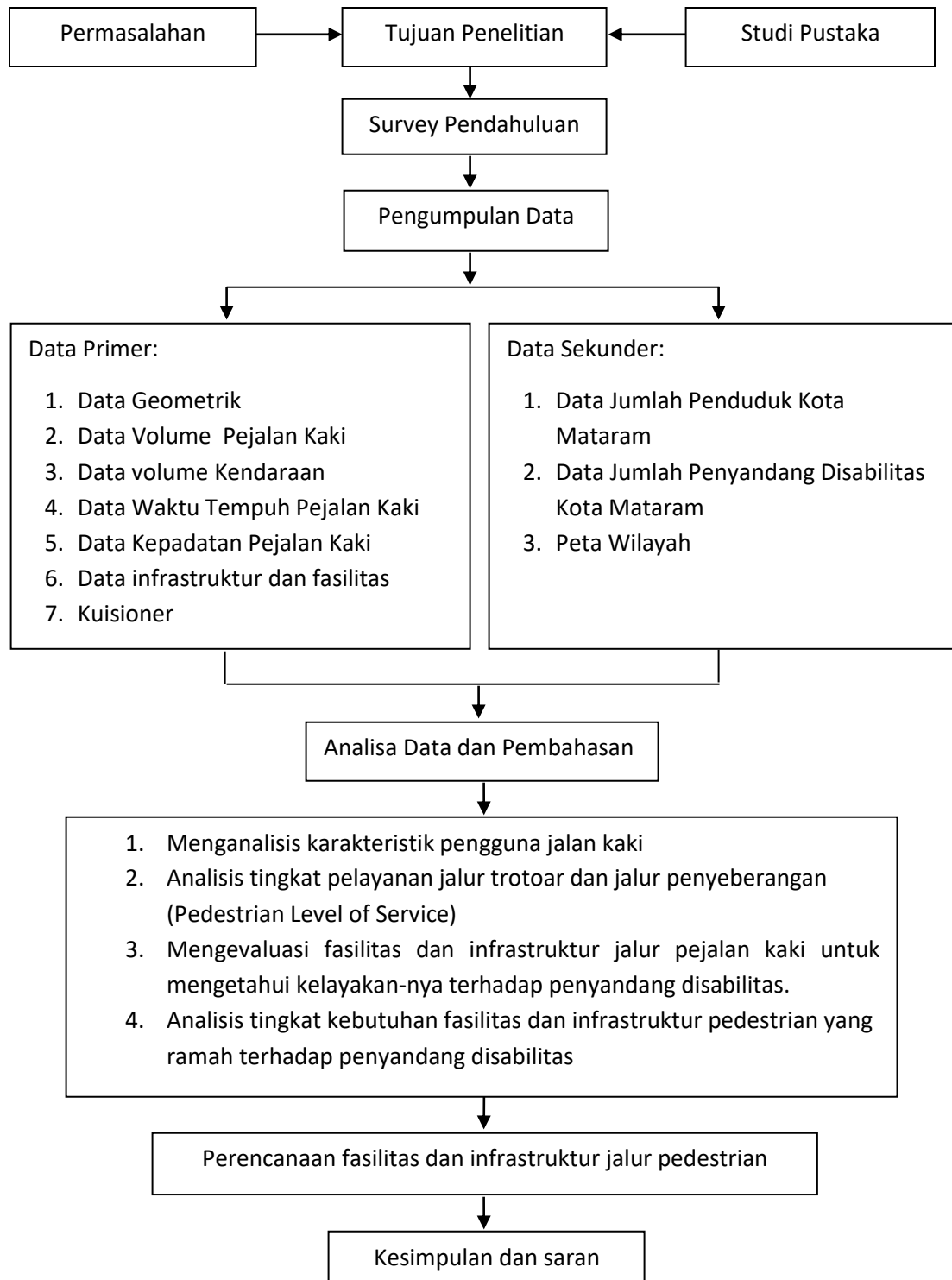
b) Koordinasi Teknis

Rapat pendahuluan ini merupakan rapat koordinasi untuk membahas teknis survey yang akan dilakukan di lapangan. Rapat pendahuluan ini direncanakan akan dihadiri oleh seluruh anggota tim survey bersama tenaga ahli dan beberapa anggota tim pokja. Sehingga terdapat kesamaan persepsi dan proses yang terstandar pada saat kegiatan dilaksanakan.

c) Survey Data Primer

Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan membuat suatu rencana survey, yaitu survey pendahuluan dan pelaksanaan survey. Survey di lapangan dilakukan selama 3 hari mewakili 1 minggu pada saat jam-jam sibuk sepanjang ruas yang diteliti. Ruas klaster dibagi menjadi 2 segmen pengamatan

Contoh 8. Tahapan Riset FLLAJ NTB (Diagram)



Baik dengan menggunakan narasi ataupun diagram, Tahapan Riset tetap berisi penjelasan mengenai proses pelaksanaan Riset. Selain itu, dalam bagian ini juga dapat dicantumkan penjelasan mengenai siklus riset, apabila diperlukan.

B.1.4.7 Sampel Riset

Sampel riset adalah sebagian dari lingkungan masyarakat yang menjadi sumber data bagi riset. Sumber data ini tidak hanya masyarakat, namun juga dapat berupa wilayah lingkungan sekitar. Bagian Sampel Riset berisi penjelasan singkat mengenai peserta riset atau batasan wilayah yang dipergunakan sebagai sumber data utama dalam riset, beserta teknik pengambilan sampel, apabila dipergunakan.

a. Sampel Jumlah Besar

Untuk riset aksi dengan jumlah sampel yang besar, seperti jumlah penduduk atau jumlah kendaraan, praktisi dapat memperkecil Sampel Riset dengan teknik pengambilan sampel.

Beberapa contoh Teknik Pengambilan Sampel yang kerap digunakan adalah:

1. Teknik Sampel Praktis
2. Teknik Sampel Acak Sederhana
3. Teknik Sampel Acak Berlapis

Masih terdapat beberapa teknik lain dalam pengambilan sampel, namun ketiga teknik ini adalah metode yang paling umum dan sering digunakan untuk memilah sampel yang berjumlah besar. Berikut adalah rasio jumlah Kerangka Sampel yang disusun oleh Lawrence Neuman, yang dapat kita pergunakan:

Rumus Slovin:
$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} \text{ ----- (1)}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = galat pendugaan

Contoh Ukuran Sampel dari Populasi dengan Tingkat Kepercayaan 95%²⁶

Ukuran Populasi	Ukuran Sampel	% Populasi Dalam Sampel
200	196	85.5%
500	352	70.4%
1000	543	54.3%
2000	745	37.2%
5000	960	19.2%
10000	1061	10.6%
20000	1121	5.6%
50000	1160	2.3%
100000	1173	1.2%

b. Sampel Jumlah Kecil

Berbeda dengan riset dengan jumlah sampel yang besar, dalam riset dengan jumlah sampel yang kecil masalah umum yang paling sering dijumpai adalah data yang tidak lengkap. Berkaitan dengan topik GESI dalam infrastruktur, seringkali sulit ditemukan ketersediaan data yang lengkap; terutama mengenai kelompok disabilitas. Data penduduk mengenai kaum disabilitas seringkali tidak lengkap, tidak terbaharui, tidak akurat, atau bahkan tidak tersedia sama sekali.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, cara-cara umum dalam mendapatkan data untuk sampel riset adalah:

1. Teknik Sampel Terstruktur

Praktisi memilih sampel peserta riset disaring dari data umum yang tersedia, dengan menetapkan ketentuan tertentu mengenai kualifikasi sebagai peserta riset.

2. Teknik Sampel Bola Salju

Praktisi mengidentifikasi 2-3 peserta riset, kemudian meminta referensi mengenai orang-orang lain yang juga berpotensi sebagai peserta riset.

3. Teknik Sampel FGD

Peneliti melakukan FGD dengan mengundang narasumber seperti peserta riset, pegawai pemerintahan, dan tokoh masyarakat, untuk kemudian melakukan verifikasi data yang tersedia dan membentuk sampel peserta riset.

²⁶Neumann (2016), hal. 295

Contoh 9. Sampel Riset HWDI NTB

Studi yang dilaksanakan meliputi proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Mataram pada area perencanaan partisipatif dan perencanaan teknokratis. Dengan demikian analisis untuk menjawab pertanyaan studi akan menjangkau proses perencanaan melalui mekanisme musrenbang yang di Kota Mataram disebut MPBM mulai dari level Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, hingga level Kota. Pada area teknokratik, titik perhatian studi adalah proses perencanaan infrastruktur yang selama ini umumnya dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah teknis terkait.

Studi ini akan mencakup proses perencanaan pembangunan infrastruktur responsif disabilitas yang terdiri dari: (1) Bangunan gedung, (2) Jalan, (3) Pemukiman, (4) Pertamanan dan pemakaman. Sementara analisis mengenai kegiatan monitoring pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada kegiatan pengawasan untuk memastikan proses perencanaan infrastruktur telah responsif disabilitas.

B.4.1.8 Indikator Riset

Indikator Riset adalah pedoman mengenai bentuk aktivitas yang akan diobservasi/diukur dalam riset. Topik riset adalah konsep dengan ruang lingkup yang sangat luas dan umum. Untuk dapat mengobservasi baik atau buruknya kondisi dari topik yang akan diteliti, praktisi memerlukan pedoman yang lebih spesifik dan sederhana. Untuk hal tersebutlah disusun Indikator Riset, agar praktisi memiliki pedoman yang jelas dan teratur, untuk menjalankan proses observasi dan pengukuran di lapangan, seperti Kuesioner, Wawancara Mendalam, FGD, dan sebagainya.

Di dalam proposal riset, bagian Indikator Riset dapat disusun cukup dengan mencantumkan tabel Indikator yang dapat dilengkapi dengan penjelasan, bila diperlukan. Berikut adalah contoh tabel Indikator.

Contoh 10. Indikator Riset HWDI NTB

Aspek-aspek yang menjadi fokus utama studi ini adalah:

1. Akses, yaitu ketersediaan akses informasi jadwal, undangan Mekanisme Perencanaan Berbasis Masyarakat (MPBM) dan dokumen perencanaan penganggaran) yang tersedia bagi kelompok disabilitas;
2. Hambatan, yaitu bentuk-bentuk hambatan dalam berpartisipasi bagi kelompok disabilitas;
3. Proses perencanaan, yaitu ketersediaan tahapan yang inklusif kebutuhan kelompok disabilitas dalam perencanaan pembangunan;
4. Sistem fasilitasi, ketersediaan sistem yang memfasilitasi kelompok disabilitas dalam perencanaan pembangunan; dan
5. Mekanisme monitoring, yaitu ketersediaan mekanisme monitoring proses perencanaan pembangunan bagi kelompok disabilitas.

Beberapa bentuk informasi tambahan yang dapat digunakan dalam narasi Indikator Riset, adalah:

- Dimensi, memilah indikator berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti kondisi fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan lainnya
- Sub-Indikator, adalah bentuk kegiatan/aktivitas empirik yang akan diobservasi dalam riset
- Skala, yaitu satuan pengukuran pada tiap-tiap indikator

B.4.1.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibedakan menjadi dua yakni pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, sehingga berpengaruh pada metode analisis yang digunakan yakni analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Dalam contoh pengumpulan data yang digunakan oleh HWDI NTB menggunakan metode kualitatif sehingga cukup berisi narasi singkat mengenai cara-cara yang digunakan dalam riset untuk mengumpulkan data lapangan. berikut adalah jenis teknik pengumpulan data yang dapat dijadikan acuan:

Tabel 6. Tabel Teknik Pengumpulan Data

Nama Teknik	Jenis Pendekatan	Digunakan Sebagai
Kuesioner	Kuantitatif	Data Primer
Survey		
Wawancara Mendalam	Kualitatif	
Catatan Lapangan		
Observasi Partisipatoris		
Studi Literatur	Kuantitatif	Data Sekunder
Data Pemerintahan		

Praktisi juga dapat menggunakan campuran teknik dari kedua pendekatan, dengan satu teknik sebagai sumber data utama dan teknik lain sebagai pelengkap. Praktisi cukup mencantumkan teknik pengumpulan data yang ingin digunakan dalam proses pelaksanaan riset, baik untuk data primer maupun data sekunder.

Contoh 11. Teknik Pengumpulan Data HWDI NTB

- a. Pengumpulan Data dan dokumen.
Data dan dokumen diperoleh dengan bersurat dan menjemputnya langsung ke kantor instansi bersangkutan dan melalui penelusuran pada portal website yang relevan. Dalam hal perlu dilakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh terbuka kemungkinan untuk meminta dokumen tematik, missal daftar undangan, daftar kehadiran, foto kegiatan, dsb.
- b. Wawancara mendalam dengan narasumber kunci.
Teknik penentuan responden adalah melalui non-probability sampling dan snow-ball.
- c. Diskusi tim ahli

Pada tahap akhir proses pengolahan data atau setelah penulisan rancangan laporan awal akan dilaksanakan diskusi tim ahli. Diskusi tim ahli ini melibatkan beberapa orang yang dipilih berdasarkan kapasitasnya terkait penguatan partisipasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur. Tim ahli berasal dari pemerintah, akademi dan kelompok masyarakat sipil.

B.4.1.10 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam riset bergantung pada Teknik Pengumpulan Data yang digunakan, sehingga praktisi juga memiliki kebebasan dalam menyusun isi bagian ini.

Teknik Analisis Data yang direkomendasikan dalam modul ini adalah analisis deskriptif, yaitu teknik analisis terhadap sebaran data untuk menyimpulkan pola korelasi antar variabel dan menyusun kesimpulan. Secara lebih sederhana, praktisi cukup membaca output data berupa tabel atau diagram untuk menyimpulkan kesimpulan mengenai hasil riset. Berikut adalah contoh narasi isi teknik analisis data yang dapat digunakan.

Contoh 12. Teknik Analisis Data HWDI NTB

Analisis Deskriptif-Kualitatif

Seluruh data primer maupun sekunder yang dihasilkan melalui serangkaian teknik pengumpulan data dalam studi ini, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Sehingga didapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai objek studi.

Narasi sederhana di atas cukup untuk mengisi bagian Metode Analisis Data. Kita tidak perlu menjabarkan secara detail proses seleksi, pembersihan, dan entry data, karena seluruh proses tersebut akan tergambar dengan sendirinya dalam bagian Hasil Penelitian.

B.4.1.11 Rentang Waktu Riset

Bagian ini menjelaskan perkiraan rentang waktu yang dibutuhkan, alokasi waktu untuk setiap tahapan dan aktivitas riset. Bagian rentang waktu riset tidak memerlukan penjelasan atau narasi, cukup mencantumkan tabel rentang waktu riset.

Contoh 13. Rentang Waktu Riset FLLAJ-NTB

No	Detail Kegiatan	Januari		Februari			
		3	4	1	2	3	4
1	Pembentukan tim						
2	Rapat Pendahuluan						
3	Survey						
4	Analisa Data						
5	Rapat Hasil Survey						
6	Ekspose						
7	Audiensi						

B.4.1.12 Rencana Anggaran dan Biaya

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), bukanlah bagian yang pada umumnya tercantum dalam laporan riset. Namun, dengan mempertimbangkan Riset Aksi sebagai langkah awal yang kemudian akan dikembangkan menjadi tindakan advokasi, pengikutsertaan RAB dapat menjadi laporan riset lebih menarik bagi para stakeholder terkait. Oleh karena itu di dalam modul ini, sangat direkomendasikan untuk mengikutsertakan RAB di dalam laporan riset sebagai bentuk pertanggungjawaban dari segi finansial, meningkatkan daya tarik laporan riset bagi stakeholder, dan memperlancar proses advokasi.

Secara sederhana, RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, peralatan, upah, hingga biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan riset. Sama seperti bagian-bagian lain dalam riset, peneliti memiliki kebebasan untuk menyesuaikan konten dan beban di dalam RAB, sesuai dengan kebutuhan riset secara spesifik. Contoh di bawah ini adalah RAB sebuah riset aksi yang dimodifikasi dari FLLAJ NTB.

Contoh 14. Rencana Anggaran Biaya Riset Aksi

BIAYA PROGRAM		Deskripsi Kegiatan	Narasi	Volume	Tipe	Frekuensi	Unit Type	Unit Cost (IDR)	Total (IDR)
IMPAC 1		Kemudahan akses bagi semua orang atas infrastruktur jalan khususnya penyandang Disabilitas							
OC 1		Adanya masukan pembangunan infrastruktur yang ramah Disabilitas							
1.6		Adanya rekomendasi hasil riset aksi untuk OPD terkait (PU dan Dishub)							
	1.6.1	Melakukan riset terkait kondisi real infrastruktur jalan dan kelengkapan serta masalah - masalah yang ada							
	1.6.1.1	Pembentukan tim							-
		Honorarium TIM:							
		Ketua		1	OK	1	Kali	300,000	300,000
		Sekretaris		1	OK	1	Kali	275,000	275,000
		Anggota		1	OK	1	Kali	250,000	250,000
		Sub total							1,075,000
	1.6.1.2	Survey identifikasi persoalan-persoalan di lapangan	Dilaksanakan oleh pihak ketiga:1.6.1.1 & 1.6.1.2	1	OK	1	Paket	50,000,000	50,000,000
		Sub total							50,000,000
	1.6.1.2	Survey awal identifikasi persoalan-persoalan di lapangan	Oktober-Desember 2018 di Sekretariat						
		Sub total							-
	1.6.1.3	Perumusan rekomendasi & advokasi perbaikan							
		Konsumsi (makan & Snack)		31	orang	1	kali	55,000	1,705,000
		Transport		21	orang	1	kali	150,000	3,150,000
		Uang saku		21	orang	1	kali	150,000	3,150,000
		ATK		1	paket	1	kali	100,000	100,000
		Penggandaan		1	eksemplar	1	kali	200,000	200,000
		Notulen		1	OK	1	kali	350,000	350,000
		Sub total							8,655,000
	1.6.1.4	Publikasi							
		Sub total							-
		Total 1.6							59,730,000

B.4.2 Pengumpulan Data

Tahapan ini merupakan tahap selanjutnya dalam kegiatan Riset Aksi. Dalam proses pengumpulan data sebuah riset aksi akan lebih bersifat valid apabila dilaksanakan secara partisipatoris, oleh karena itu proses diskusi terbatas / *Focus Group Discussion* (FGD) bisa menjadi salah satu metode yang digunakan selain interview dan kuisioner. Diskusi terbatas untuk pengumpulan data bisa dilakukan berdasarkan kelompok umur, kelompok lembaga yang bergerak di isu / kepentingan yang sama, kelompok dinas yang mempunyai fokus tugas yang sama, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok desa yang menjadi lokasi proyek infrastruktur maupun kelompok pengambil kebijakan. Selain FGD untuk kelompok sektoral, bisa juga dilakukan FGD pengumpulan data lintas sektor dengan tahap-tahap tertentu.



B.4.3 Analisis dan Laporan

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam kegiatan Riset Aksi adalah melakukan analisis atas data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Hasil analisis atas data-data inilah yang akan menjadi kesimpulan dan rekomendasi Riset Aksi yang dilakukan. Bagian ini secara spesifik akan mengulas tentang analisis dan sistematika dokumen laporan Riset Aksi.

B.4.3.1 Analisis Data

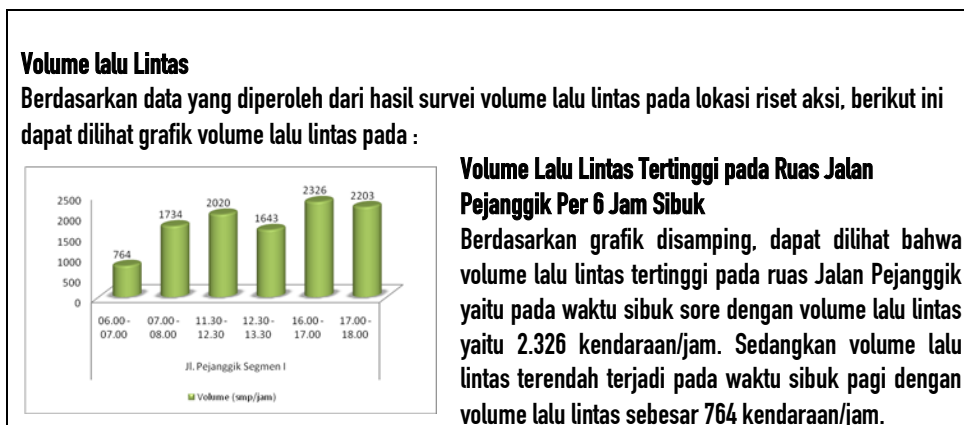
Analisis adalah proses mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali sesuai dengan kriteria tertentu serta menemukan keterkaitan satu dengan yang lain untuk ditafsirkan maknanya.

Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa analisis data yang digunakan dalam modul ini berbentuk analisis deskriptif. Teknik Analisis Deskriptif adalah analisis sederhana mengenai gambaran/kondisi sebuah objek berdasarkan data yang dimiliki, baik data berupa angka ataupun narasi. Dalam teknik ini, praktisi cukup “mendeskripsikan” kondisi lapangan yang ditemukan sesuai dengan data riset, tanpa perlu menarik hubungan kausal atau sebab-akibat. Analisis deskriptif dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Analisis Data Deskriptif-Kuantitatif

Analisis Data Deskriptif-Kuantitatif adalah analisis yang dilakukan berdasarkan data data kuantitatif seperti survey atau data tabel. Dalam analisis ini, praktisi cukup mencantumkan diagram atau tabel data tunggal dari hasil riset, dilengkapi dengan narasi deskripsi yang sesuai. Tabel data tunggal dapat diambil dari output data yang telah diolah sebelumnya. Perhatikanlah contoh berikut:

Contoh 15. Hasil Riset FLLAJ-NTB (Analisis Data Kuantitatif)



b. Analisis Deskriptif-Kualitatif

Serupa dengan Analisis Data Kuantitatif, Analisis Data Kualitatif mencantumkan berupa kutipan-kutipan hasil wawancara mendalam, catatan lapangan, maupun observasi, untuk memperkuat narasi analisis yang diajukan. Perhatikanlah contoh berikut:

Contoh 16. Hasil Riset HWDI NTB

Stigma yang sering muncul di persepsi birokrasi pemerintah tentang penyandang disabilitas sangat mengakar. Penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kapasitas untuk beraspirasi dan berkembang secara setara sebagaimana warga Negara lainnya. Sehingga, penyandang disabilitas, baik sebagai pribadi maupun kelompok, tidak mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di sepanjang siklus perencanaan pembangunan daerah. Padahal pengalaman setiap orang tidak sama dan hanya dapat disuarakan sendiri oleh masing-masing orang, baik secara pribadi maupun kelompok. Lurah Abian Tubuh menyatakan pendapatnya tentang pelibatan penyandang disabilitas di MPBM saat diwawancarai, mengatakan:

“Kalaupun kami undang, mereka (penyandang disabilitas) hanya akan datang dan duduk, tidak akan bisa bersuara.” (Wawancara tanggal 8 Februari 2018)

Narasi di atas merupakan contoh sederhana dari analisis data tunggal, dengan menggunakan data kuantitatif (data angka) dan data kualitatif (data hasil wawancara). Dalam menyusun Hasil Riset, praktisi memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai data dalam bentuk apapun yang tersedia, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Praktisi juga memiliki kebebasan untuk memilih menentukan topik atau indikator yang dicantumkan dalam Temuan Riset.

B.4.3.2 Sistematika Laporan Riset Aksi

Salah satu keunggulan dan alasan dari penggunaan Riset Aksi, adalah disusun berdasarkan metodologi sistematis berdasarkan aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Maka, walaupun terdapat kebebasan dari praktisi untuk menambahkan atau memodifikasi struktur laporan, berikut adalah komponen dasar yang umum digunakan dalam sistematika penulisan laporan Riset Aksi²⁷.

Sistematika Dokumen Laporan Riset Aksi			
Bagian 1	Bagian 2	Bagian 3	Bagian 4
1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Riset	2. Metodologi 2.1. Kajian Pustaka 2.2. Bentuk Riset	3. Hasil Riset 3.1. Hasil Riset Mengenai Topik 1	4. Penutup 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran dan

²⁷Riduwan (2015), hal.11-14

Sistematika Dokumen Laporan Riset Aksi			
Bagian 1	Bagian 2	Bagian 3	Bagian 4
1.2. Tujuan Riset 1.3. Manfaat Riset	2.3. Tahapan Riset 2.4. Metodologi Riset 2.4.1. Area/Sampel Riset 2.4.2. Indikator Riset 2.4.3. Teknik Pengumpulan Data 2.4.4. Rentang Waktu Riset 2.5. Rancangan Anggaran & Biaya	3.2. Hasil Riset Mengenai Topik 2 dst	Rekomendasi

Sesuai dengan tabel di atas, sistematika dokumen laporan Riset Aksi terdiri atas 4 bagian utama yakni; **(1) Pendahuluan, (2) Metodologi, (3) Hasil Riset, dan (4) Penutup.**

Kesimpulan

Kesimpulan berisi argumen final dalam riset, terutama mengenai berkaitan dengan rumusan yang tertulis di dalam **Tujuan Riset**. Tujuan utama dari dituliskannya bagian Kesimpulan adalah menjawab Tujuan Riset; berdasarkan berdasarkan hasil-hasil temuan riset, dengan jelas dan tegas.

Contoh 17. Kesimpulan Riset Aksi HWDI

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil studi adalah sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam Mekanisme Perencanaan Berbasis Masyarakat/ MPBM di Kota Mataram, baik dari tingkat Lingkungan hingga tingkat MPBM Kota;
2. Tertutupnya akses penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan, khususnya infrastruktur karena masih kuatnya stigma yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi seperti warga negara lainnya. Selain itu disebabkan karena lemahnya komitmen pemerintah yang ditandai dengan pendataan dan kondisi aksesibilitas infrastruktur yang masih terbatas;
3. Kelompok penyandang disabilitas memiliki peluang besar untuk terlibat dalam memastikan infrastruktur yang aksesibel yang terlihat dengan komitmen misi pemerintah Kota yang tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016–2021;
4. Dua pola fasilitasi yang dapat dilakukan pemerintah kota untuk memastikan partisipasi aktif kelompok penyandang disabilitas dalam perencanaan dan monitoring infrastruktur, yaitu mendorong penguatan kapasitas kelompok penyandang disabilitas di tingkat kelurahan dan Kota. Di samping itu, memastikan keterwakilan mereka dalam Mekanisme Perencanaan Berbasis Masyarakat/ MPBM dengan menyediakan pendamping;

Selain narasi berdasarkan Tujuan Riset, Kesimpulan juga dapat menyertakan beberapa deskripsi hasil analisa riset yang dianggap menarik untuk dibaca ataupun penting bagi perkembangan masyarakat.

Saran dan Rekomendasi

Saran cukup berisi rekomendasi-rekomendasi dari praktisi mengenai tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, mengenai fenomena, permasalahan, dan hasil penelitian riset.

Contoh 18. Saran dan Rekomendasi Riset Aksi FLLAJ NTB

1. Fasilitas Pejalan Kaki Menyusuri

Menurut Petunjuk Perencanaan Trotoar, Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga, 1990, menyatakan apabila didasarkan pada ruang pejalan kaki trotoar disarankan untuk direncanakan dengan tingkat pelayanan serendah – rendahnya pada tingkat pelayanan C. Pada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan trotoar dapat direncanakan, sampai dengan tingkat pelayanan E.

Untuk itu penulis mencoba memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat pelayanan pejalan kaki pada kawasan Center Business District (CBD) kota mataram. Rekomendasi yang dapat diusulkan adalah rekomendasi yang sesuai dengan hasil perhitungan atau paling tidak pada tingkat pelayanan minimum yang disebutkan diatas. Untuk rekomendasi yang diusulkan, penulis mencoba membuat rekomendasi lebar trotoar dengan kondisi eksisting yang ada dengan mengacu pada Pedoman Teknis Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda, yang merupakan kerjasama antara GIZ-SUTIP dengan Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi yang dibuat adalah dengan menentukan lebar zona pejalan kaki. *Zona* pejalan kaki terdiri dari ruang kerb, ruang multifungsi, ruang pejalan kaki yang menerus, dan ruang muka bangunan.

a) *Kerb*

Kerb merupakan pembatas antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor. Lebar kerb yang direkomendasikan dilokasi studi adalah sebesar 150 mm dengan tinggi 250 mm.

b) Ruang multifungsi (*Furnishing Zone*)

Ruang multifungsi merupakan ruang yang membatasi pejalan kaki dengan lalu lintas kendaraan (badan jalan). Ruang ini bukan hanya berperan sebagai penyangga bagi pejalan kaki, namun juga ruang dimana elemen – elemen jalan seperti tanaman peneduh, utilitas (box telepon, tiang listrik, tempat sampah, dll) serta perabot jalan berupa rambu lalu lintas, halte bus, tiang lampu jalan, bangku jalan, dll ditempatkan. Ruang multifungsi pada ruas Jalan Pejanggik direkomendasikan sebesar 1,5 meter, dengan asumsi pada lokasi studi digunakan tanaman peneduh.

c) Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki merupakan bagian dari koridor sisi jalan yang secara khusus disediakan bagi pejalan kaki untuk berjalan. Ruang pejalan kaki yang direkomendasikan pada ruas Jalan Pejanggik adalah 1,8 meter.

d) Ruang muka bangunan.

Ruang muka bangunan merupakan area antara ruang pejalan kaki dan batas bangunan disamping jalan. Ruang muka bangunan yang direkomendasikan pada ruas Jalan Pejanggik adalah 1 meter, karena pada Jalan Pejanggik tingkat aktifitas samping cukup tinggi.

Rekomendasi untuk lebar trotoar yang dapat diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.41
Rekomendasi Lebar Trotoar pada kawasan CBD Kota Mataram

No	Zona Pejalan Kaki	Lebar yang direkomendasikan (m)
1	Kerb	0.2
2	Ruang Multifungsi	1
3	Ruang Pejalan Kaki Menerus	1.8
4	Ruang Muka Bangunan	1
Jumlah		4

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa lebar trotoar yang direkomendasikan adalah 4 m untuk sisi utara dan sisi selatan ruas jalan pada kawasan *Center Business District* CBD Kota Mataram.

Perubahan lebar trotoar yang direkomendasikan akan mempengaruhi nilai karakteristik atau kinerja fasilitas pejalan kaki yang juga berpengaruh pada tingkat pelayanannya. Maka perlu adanya perbandingan tingkat pelayanan eksisting dengan rekomendasi untuk membandingkan kinerja trotoar setelah ada penerapan rekomendasi sebagai pertimbangan dalam penentuan rekomendasi yang paling baik.

1. Fasilitas Pejalan Kaki Menyeberang Jalan

Pada rekomendasi awal yang telah ditentukan sebelumnya, fasilitas penyeberangan pejalan kaki pada kawasan CBD kota mataram direkomendasikan dengan menggunakan *zebra cross*, pelican dan pelican dengan pelindung dengan lokasi penempatan sebagai berikut:

- Untuk ruas jalan pejanggik segmen I, penempatan pelican crossing direkomendasikan didepan SMAK Kesuma Mataram dan didepan Indomaret Swalayan, karena pada segmen tersebut volume pejalan kaki cukup tinggi.
- Untuk ruas jalan pejanggik segmen II, penempatan *zebra cross* diusulkan menjadi satu kesatuan dengan APILL pada persimpangan Cakranegara.
- Untuk ruas jalan AA Gede Ngurah, penempatan *zebra cross* direkomendasikan didepan toko kue mirasa karena pada lokasi tersebut volume pejalan kaki cukup tinggi.
- Untuk ruas jalan Panca Usaha segmen I, penempatan *zebra cross* direkomendasikan didepan toko eiger dan counter vivo karena pada lokasi tersebut volume pejalan kaki cukup tinggi.
- Untuk ruas jalan Panca Usaha segmen II, penempatan pelican crossing dengan pelindung direkomendasikan didepan hotel Lombok Raya karena pada lokasi tersebut volume pejalan kaki cukup tinggi. Karena ruas Jalan panca usaha merupakan jalan satu arah, maka rekomendasi yang digunakan hanya dengan pelican, tidak menggunakan pulau pelindung.
- Untuk ruas jalan Bung Hatta, penempatan *zebra cross* direkomendasikan didepan pemadam kebakaran karena pada lokasi tersebut volume pejalan kaki cukup tinggi.

B.5 Cara Menggunakan dan Tidak Lanjut Riset Aksi

Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, salah satu dimensi dalam Riset Aksi adalah adanya **dimensi aksi** sebagai sebuah upaya yang transformatif, atau bertujuan untuk mendesakkan sebuah perubahan. Maka dengan demikian Riset Aksi tidak akan berhenti pada publikasi atas hasil riset dan rekomendasi untuk riset berikutnya, melainkan harus dipergunakan dengan lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat maupun komunitas dalam memahami dan mengubah kondisi mereka menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Riset Aksi sebagai medium penyadaran dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian hasil Riset Aksi selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengembangan program pemberdayaan masyarakat, dengan mempromosikan hasil riset tersebut kepada pihak eksternal dalam berbagai bentuk media. Beberapa bentuk tindak lanjut (baik dalam rupa dokumen/media atau kegiatan) yang dapat dilakukan selanjutnya seperti;

B.5.1 Policy Brief

Policy Brief adalah selebaran berisi rangkuman singkat mengenai isu dari topik tertentu dan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan isu tersebut, serta rekomendasi terhadap kebijakan yang dianggap paling ideal²⁸.

Policy Brief bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu tertentu, terutama bagi pihak pemerintah dan pihak-pihak lain yang tercakup dalam proses pengambilan kebijakan publik. Format umum dari Policy Brief adalah 1 lembar A4 (210x297mm) dengan narasi yang tidak lebih dari 700 kata. Policy Brief biasanya memiliki desain yang mencolok untuk menarik perhatian, disertai dengan foto ataupun gambar. Perhatikan susunan dasar dari Policy Brief berikut:

- Judul, judul yang mencakup isu dan topik terkait
- Ringkasan, rangkuman dari isi narasi Policy Brief
- Rekomendasi, rekomendasi kebijakan-kebijakan yang dapat diambil berkaitan dengan isu
- Narasi, bagian badan Policy Brief yang berisi berbagai aspek penjelasan mengenai topik dan isu, seperti penyebabnya, implikasinya terhadap masyarakat, tindakan yang dapat diambil, dan lain, lain.
- Implikasi, implikasi dari kebijakan yang direkomendasikan dalam Policy Brief, termasuk kelebihan dan kekurangannya

²⁸Mundy (2011), hal.141

- Kesimpulan, kata penutup yang berisi rekomendasi akhir dari kebijakan yang dianggap paling ideal, serta penekanan mengenai pentingnya untuk mengambil tindakan mengenai isu terkait.

Dalam menyusun Policy Brief, perlu juga diperhatikan karakteristik dari Policy Brief, yaitu:

1. Ringkas dan padat
2. Berdasarkan data bukan konsep/teori
3. Penjelasan berfokus pada hasil kebijakan, bukan pada metode pelaksanaan
4. Penggunaan desain yang menarik perhatian
5. Membahas isu dan topik Policy Brief dalam konsep makro
6. Memiliki gaya penulisan bersifat urgensi

Policy Brief adalah salah satu tindak lanjut yang paling cocok dengan hasil laporan Riset Aksi Partisipatoris. Hampir seluruh isi laporan riset dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun Policy Brief, seperti Latar Belakang Masalah, Manfaat Riset, Temuan Riset, Kesimpulan, dan sebagainya.



B.5.2 *Concept Note*

Concept note adalah ringkasan proposal proyek yang mencakup deskripsi singkat mengenai konsep dasar dan tujuan dari proyek tersebut²⁹.

Concept Note pada umumnya digunakan oleh organisasi nirlaba sebagai langkah awal pengenalan proyek kepada pihak lembaga donor. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya lembaga donor cenderung lebih memilih penggunaan *Concept Note* untuk melakukan evaluasi awal, daripada proposal program dengan dokumen-dokumen lengkap. Dengan menggunakan *Concept Note*, lembaga donor bisa mendapatkan gambaran yang ringkas dan padat mengenai topik dan tujuan dari sebuah program; sehingga dapat melakukan evaluasi awal berupa kesesuaian program tersebut dengan visi dan misi lembaga, tanpa harus membaca proposal penuh. Karena sifatnya yang ringkas dan padat, *Concept Note* lazim dikirim tanpa harus menunggu permintaan resmi dari pihak donor. Pada umumnya *Concept Note* berisi 300-500 kata, yang mencakup:

- **Judul Proyek**
- **Latar Belakang Proyek**, menjelaskan topik dan isu yang akan ditangani oleh proyek, serta pentingnya pelaksanaan proyek tersebut bagi masyarakat.
- **Tujuan dan Manfaat Proyek**, berisi daftar/pointer mengenai tujuan dan manfaat proyek
- **Strategi Program/Daftar Aktivitas Proyek**, berisi daftar/pointer mengenai aktivitas yang akan dilakukan dalam proyek
- **Hasil Yang Diharapkan**, yaitu perhitungan praktis dari hasil yang akan dicapai serta rentang waktu untuk mencapai hasil tersebut
- **Inovasi Proyek**, penjelasan mengenai karakteristik khas dari proyek ini, inovasi yang ditawarkan, nilai tambah yang didapatkan oleh lembaga donor.
- **Estimasi Biaya**, berisi estimasi biaya dari implementasi proyek
- **Latar Belakang Nirlaba**, berisi sejarah dan keunggulan dari organisasi nirlaba, serta detail kontak person yang dapat dihubungi

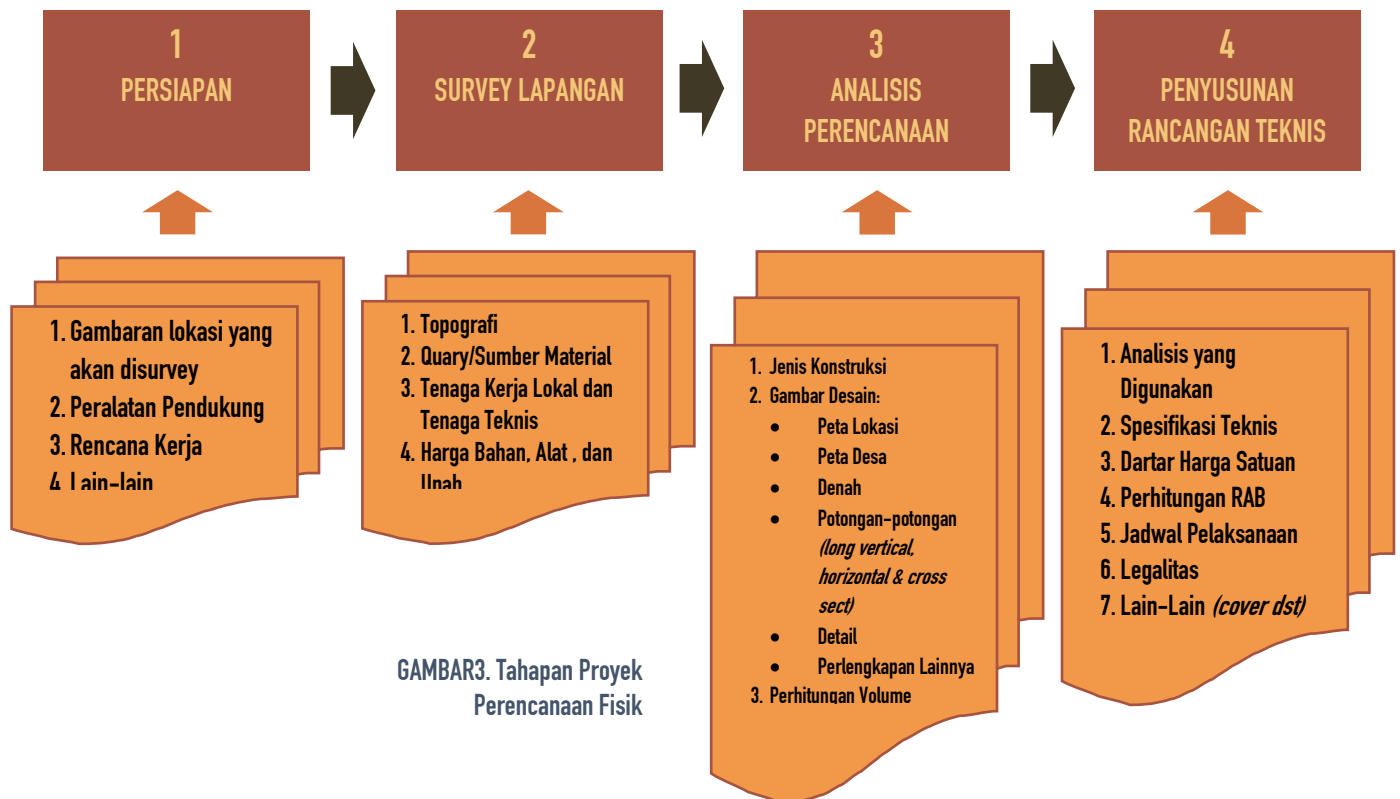
Penyusunan *Concept Note* sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan proyek pemberdayaan masyarakat, adalah langkah tindak lanjut yang sesuai dengan karakteristik Riset Aksi, yaitu pemberdayaan masyarakat. Peran utama dari laporan Riset Aksi Partisipatoris dalam penyusunan *Concept Note*, adalah sebagai sumber data, terutama pada bagian Strategi Program dan Hasil Yang Diharapkan. Dengan mencantumkan data riil dari riset aksi yang disusun dengan metodologi yang jelas, *Concept Note* memiliki justifikasi yang lebih kuat.

²⁹How to Write a Concept Note, diakses <https://www.fundsforngos.org/>

B.5.3 Proyek Perencanaan Fisik

Proyek Perencanaan Fisik (PPF), atau lebih dikenal dengan nama *Detailed Engineering Design* (DED) adalah produk dari konsultan perencana, berupa perencanaan proyek pembangunan infrastruktur, seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya³⁰.

Proyek Perencanaan Fisik terdiri dari beberapa tahapan seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut;



GAMBAR3. Tahapan Proyek Perencanaan Fisik

Sedangkan komponen yang perlu diperhatikan sebagai kelengkapan pelaksanaan PPF antara lain:

- **Gambar Rencana Teknis**
Hasil survei lapangan dalam bentuk gambar gambar teknis guna memudahkan dalam perhitungan teknis dan penerapan pelaksanaan fisik infrastruktur
- **Rencana Anggaran Biaya (RAB)**
Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau Proyek tersebut.

³⁰Detail Engineering Design (DED): Rencana Anggaran Biaya (RAB), diakses dari <https://kmpisew.files.wordpress.com/>

- **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)**

Mencakup seluruh persyaratan mutu dan kuantitas yang wajib dipenuhi penyedia konstruksi, seperti material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material, dan persyaratan lainnya.

Selain 3 hal di atas, 5 bagian utama dalam komponen proyek / PPF yang perlu diperhatikan antara lain: Sumber Daya Manusia, Waktu, Anggaran, Ruang Lingkup Proyek dan Sistem.

Oleh karena banyaknya komponen yang sangat penting dan harus disertakan dalam sebuah PPF, maka sebuah Proyek Perencanaan Fisik hanya dapat disusun oleh konsultan proyek-proyek konstruksi. Oleh karena itu, peran hasil riset aksi dalam penyusunan Proyek Perencanaan Fisik terbatas sebagai sumber data dan rekomendasi pada tahap Persiapan atau Survey Lapangan.

B.5.4 Lobi & Audiensi

Kita sering mendengar konsep lobi dan audiensi, kegiatan tersebut dilaksanakan jika terjadi perbedaan / pertentangan diperlukan dialog dan musyawarah melalui lobi dan negosiasi terutama jika terjadi temuan masalah yang membutuhkan penyelesaian disertai data dan fakta. Lobi mengalami tingkatan yakni di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Di sektor infrastruktur lobi bisa dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak pengambil keputusan perbaikan misalnya Gubernur, bupati, setda, Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PU, DPRD, dan pihak-pihak pengambil keputusan lainnya.

B.5.5 Konsultasi Publik

Pengertian terkait konsultasi publik sangatlah beragam. Secara umum konsep ini banyak ditemukan dari sudut pandang relasi lembaga eksekutif dan legislatif dengan masyarakat. Konsultasi publik ini sendiri diartikan sebagai “cara, mekanisme, dan proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik oleh eksekutif maupun legislatif (FPPM dan LGSP 2009).

Memang benar jika dikatakan bahwa publik telah memberikan mandat kepada lembaga eksekutif maupun legislatif untuk mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan publik. Namun, ini bukan berarti bahwa lembaga-lembaga ini dapat menetapkan kebijakan tanpa sepengetahuan publik sebagai pemberi mandat. Publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil penerima mandat.

bahkan, jika dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang sangat kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri.

B.5.6 Kampanye Media

Kegiatan advokasi untuk GESI dalam infrastruktur melalui media memerlukan ketepatan bentuk maupun penempatan. Hal tersebut agar media yang akan dipasang tidak mengalami in-efisiensi atau malah tidak mempunyai daya tarik karena salah posisi dan salah pemilihan bentuk. Karena media ini akan ditempatkan di lokasi yang ramai, fasilitas publik, dan ramai baik orang maupun kendaraan, maka perlu pemilihan bentuk, warna, penempatan dan juga kalimat yang tepat.

Mengapa penyampaian pesan-pesan yang berbentuk advokasi perlu disampaikan melalui media? Hal tersebut dikarenakan:

1. Membantu mengubah sikap masyarakat dalam bersikap/memilih
2. Mempengaruhi kebijakan pemerintah dan legislasi
3. Mencari dana untuk tujuan kita
4. Merekrut anggota atau pendukung untuk tujuan kita

Sebagai salah satu bagian dari memberikan informasi dan edukasi, media kampanye dalam untuk memberikan penyadaran berbagai pihak dalam sektor infrastruktur maupun transportasi sangat penting. Bentuk-bentuk media kampanye itu bisa disesuaikan dengan tujuan, sumberdana dan sumberdaya.

Proses advokasi selain dilakukan melalui audiensi, riset aksi, lobi, dan bentuk kegiatan lainnya juga bisa dilakukan dengan menggunakan media dengan aneka bentuk, diantaranya: baliho, spanduk/banner, leaflet, brosur, pamflet, buku saku, dll yang dapat disampaikan secara fisik maupun melalui media sosial (instagram, facebook, twitter, koran online, dll). Jika advokasi yang dilakukan mempunyai arah perubahan yang sangat mendesak bisa juga menggunakan siaran dan konferensi pers, mengisi berita di televisi, artikel di surat kabar, editorial, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan et al. (2014). *Care International Advocacy Handbook*. Geneva: Care Internationals.
- Arikunto, Suharsini. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bryson, John M. (2007). What to do when Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques, dalam *Public Management Review* (Vol.06, pp21-53). Oxfordshire: England
- Cohen et al. (2010). *Advocacy Toolkit*. New York: UNICEF
- Edlestone et al. (2013). *The Education We Want: An Advocacy Toolkit*. New York: UNICEF
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides
- Kartono & Nurcholis. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Diakses tanggal 12/03/2019, dari <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/>
- Kumalaningsih, Sri. (2012). *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mundy et al. (2011). *Food Security: Communication Toolkit*. Rome: Food and Agriculture Organization of United Nation .
- Neumann, W. Lawrence. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Obondoh, Andiwo. (2004). *Advocacy as an Imperative for CSOs in Education & Development: Some Basics*. ANCEFA. Diakses tanggal 11/03/2019, dari <http://www.ancefa.org/>
- Prud'homme, Remmy. (2004). *Infrastructure and Development*. Paris: University of Paris
- Riduwan. (2015). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- World Bank. (2009). *Making Infrastructure Work for Men and Women: A Review of World Bank Infrastructure Projects*. Washington: The World Bank
- World Bank. (1994). *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. New York: Oxford University Press

Artikel

Description of Services: Provision of NTB CSOS Program Management Capacity Strengthening in GESI of Infrastructure/Road Sector, tidak diterbitkan

Detail Engineering Design (DED): Rencana Anggaran Biaya (RAB), diakses tanggal 13/03/2019, dari https://kmppisew.files.wordpress.com/2018/01/07-ded-rab_04_06_2017.ppt

How to Write a Concept Note, diakses tanggal 13/03/2019, dari <https://www.fundsforngos.org/concept-note/how-to-write-a-concept-note/>

Ini Deretan Infrastruktur yang Dibangun di Era Jokowi, diakses tanggal 15/03/2019, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608553/ini-deretan-infrastruktur-yang-dibangun-di-era-jokowi>

Ini Lima Sektor Prioritas Pembangunan dalam RAPBN 2017, diakses tanggal 15/03/2019, dari <https://bisnis.tempo.co/read/796564/ini-lima-sektor-prioritas-pembangunan-dalam-rapbn-2017/full&view=ok>

4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur, diakses tanggal 14/03/2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur?page=2>

Pentingnya Kesetaraan Gender dan Keadilan di Indonesia, diakses tanggal 14/03/2019, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia>

Perspektif GESI dalam R & D untuk Kebijakan Publik yang Inklusif, diakses tanggal 15/03/2019, dari <http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/perspektif-gesi-dalam-r--d-untuk-kebijakan-publik-yang-inklusif>

SOC (Social Overhead Capital), diakses tanggal 11/03/2019, diakses dari <https://www.theprojectdefinition.com/soc-social-overhead-capital/>

Profil Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diakses tanggal 17/03/2019, dari <http://pug-pupr.pu.go.id/content/show/24/sejarah>

Writing a Concept Note, diakses tanggal 13/03/2019, dari <https://sswm.info/sswm-solutions-bop-markets/providing-wash-services-and-products-bop-customers/financial-marketing/writing-a-concept-note>

